Praksis
Buletin PARTAI PERGERAKAN KEBANGSAAN Kota Semarang
www.pergerakankebangsaan.org

Menemukan Kembali INDONESIA

Praksis | Edisi 16 | Thn IV | Nopember 2008 - Pebruari 2009

BBM dan Kepemimpinan

Tanggal 19 Januari 2009, Metro TV pada malam hari menayangkan acara diskusi tentang BBM. Pertanyaan awal yang dilempar presenter cukup menggelitik, kenapa ketika kenaikan BBM yang mengumumkan kepada masyarakat adalah menteri sedangkan ketika menurunkan harga BBM yang mengumumkan Presiden sendiri?

Dijawab dengan tangkas oleh anggota DPR dari Partai Demokrat bahwa itu hanya masalah teknis. Pertanyaan sama kembali diulang, inti jawaban adalah sama, masalah teknis. Betulkah ini hanya masalah teknis?

Jika oleh anggota DPR dari Partai Demokrat dengan cekatan menegaskan bahwa itu hanya masalah teknis, maka kesempatan ini juga akan ditegaskan bahwa itu bukan hanya masalah teknis, tetapi juga, dan lebih penting adalah masalah kepemimpinan, *leadership*.

Membuat keputusan yang akan memberatkan hidup rakyat memang bukan permasalahan yang mudah. Dan ketika harus disampaikan hal keputusan tersebut kepada rakyat yang memilihnya, sebenarnya tidak masalah itu disampaikan oleh para menteri sebagai pembantu-pembantu Presiden. Betul, meski dengan berat hati itu juga bisa disebut sebagai masalah teknis.

Masalahnya adalah ketika keputusan yang membuat rakyat dilonggarkan beban hidupnya, ketika katakanlah keputusan itu menjadikan rakyat senang, kenapa penyelesaian teknis penyampaiannya berbeda dengan saat kenaikan BBM? Yang terakhir ini, Presiden sendiri yang mengumumkan. Nah, disini sudah menjadi bukan sekedar masalah teknis lagi. Ini menjadi masalah kepemimpinan. Pemimpin yang ketika musuh ada di depan mata ngumpet di belakang prajuritnya dan ketika tiba saatnya menerima penghargaan, berdiri paling depan. Dan upacara penerimaan penghargaan itu kemudian dipotret, disebar luaskan untuk kembali meyakinkan pemilih yang dulu memilihnya, dia layak dipilih lagi.

Jadi sekali lagi, ini bukan masalah teknis, tetapi masalah kepemimpinan. Maka kita juga semakin paham mengapa pemerintahan ini dalam menyikapi Nurdin Halid, ketua umum PSSI yang memimpin PSSI dari balik penjara karena kasus korupsi, bau busuk itupun sampai sekarang tidak kunjung hilang. Sayang...

Redaksi Praksis

Daftar Isi

» Merayakan Pasar Bebas 3
» Kartel dan Pergeseran Koalisi 9
» Kejahatan Korporatokrasi di Indonesia 11
» MAFIA BERKELEY menghegemoni kebijakan ekonomi Indonesia 15
» REVOLUSI HIJAU dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi 21
» Carut Marut Pendidikan 22
» Menyoal Kembali Kesetaraan Gender 24
» Gender dari Beberapa Sumber 33
» Ngobrol Bareng Kwik Kian Gie 38

Redaksi

Praksis adalah alat komunikasi dan belajar bersama yang diterbitkan berkala setiap dua bulan oleh Partai Pergerakan Kebangsaan Kota Semarang

Tim Redaksi : Andi Y. Widianto, Greg Sudargo.
Sirkulasi : Poengky Pamungkas, Satya Graha
Lay-out : Andi Yulius, Iwan

Alamat:
Jl. Surtikanti Tengah IV No. 10 Semarang
✉ **pergerakan@gmail.com**

www.pergerakankebangsaan.org

Merayakan Pasar Bebas

Pada awal 1970, perdagangan valuta asing bernilai 10 miliar hingga 20 miliar. Pada tahun 2000, perdagangan valuta asing telah mencapai 1,6 triliun dolar atau 75 kali perdagangan dunia. Perdagangan mata uang yang sebelumnya diletakkan dalam kerangka teori yang sangat terikat dengan permintaan barang dan jasa sekarang didominasi oleh tujuan-tujuan spekulasi jangka pendek.[a]

Neoliberalisme atau sering disebut dengan pasar bebas, dalam arti semua aspek kehidupan, hidup dan berkembangnya adalah didasarkan logika pasar, oleh David Harvey dikatakan sebagai proyek untuk merestorasi kelas elit atau kelas kaya. Dan salah satu instrumen utamanyanya adalah *finansialisasi*. Dari data yang disampaikan oleh David Harvey, *turnover* harian dari transaksi-transaksi keuangan di pasar-pasar internasional pada tahun 1983 adalah sebesar $ 2,3 milyar, dan meningkat menjadi $ 130 milyar pada tahun 2001. *Turnover* tahunan pada tahun 2001 sebesar $ 40 triliun, padahal untuk mendukung arus investasi perdagangan dan produksi internasional diperkirakan hanya membutuhkan $ 800 milyar.[b] Michael Hudson, tahun 1972 sudah menangkap gejala ke arah finansialisasi ini.[c]

Beberapa hal di atas sebenarnya menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam modus akumulasi dengan penciptaan atau menggeser pengutamaan alat-alat untuk memproduksi kekayaan. Akumulasi kekayaan bergeser ke alat-alat spekulasi keuangan. Berbagai variasi produk atau bentuk yang digunakan dalam spekulasi keuangan ini, meskipun berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya semua didasarkan pada logika yang sama, yaitu *logika waktu pendek*. Atau seperti yang ditegaskan diatas, spekulasi keuangan didominasi oleh spekulasi jangka pendek.

Ketika pada jaman dulu produksi masih hanya terkait dengan pertanian maka yang muncul adalah tuan tanah – tuan tanah yang akhirnya terbentuk suatu masyarakat feodal. Perkembangan yang ada menunjukkan, ketika kelas kapitalis dengan dukungan perkembangan teknologi yang mendorong revolusi industri berhasil menggeser golongan feodal, maka perlahan sistem pemerintahan kerajaanpun tumbang satu persatu digantikan oleh sistem republik. Artinya adalah, ketika ada pergeseran dalam hal bagaimana produksi diselenggarakan maka akan adapula pergeseran dalam bangunan politik di atasnya.

Maka ketika membicarakan negara, Harold J. Laski membedakan antara negara dalam teori dan negara dalam

praktek.[d] Negara netral karena selalu berusaha untuk melaksanakan kehendak umum hanya ada dalam teori, dalam praktek negara tidak lepas dari kepentingan siapa yang sedang dominan. Dan dominasi ini adalah erat kaitannya dengan siapa yang menguasai alat-alat yang mampu memproduksi kekayaan.

Sebelum era Neoliberalisme ini merebak ke seluruh dunia dengan jargon globalisasi-nya, maka ketika dominasi produksi laba masih terkait dengan produksi barang dan jasa, logika waktu pendek dalam akumulasi kekayaan menjadi hal yang tidak umum. Kekayaan hanya bisa diraih dengan menekuni dan mengembangkan produk barang dan jasa yang berkualitas dan bersaing. Tidak ada yang instan dalam hal menjadi kaya.

Maka yang terjadi dalam politik pun adalah bertahannya penguasa-penguasa dalam waktu yang lama. Seorang presiden, seorang diktator bisa bertahan memerintah suatu negara dalam waktu lima belas, dua puluh bahkan tiga puluh dua tahun lamanya.

Munculnya seorang diktator pada masa itu juga bisa dilihat sebagai suatu solusi antara tuntutan dari kapitalisme yang berkembang saat itu dan logika demokrasi yang muncul seiring dengan upaya meruntuhkan kekuasaan aristokrat dalam masyarakat feodal.

Dalam kapitalisme, alat produksi adalah digunakan untuk tujuan, satu-satunya tujuan, menghasilkan *profit*, laba. Tujuan menghasilkan laba ini menuntut terciptanya upah yang lebih rendah, pelayanan jasa yang minimal yang masih bisa diterima, penghematan biaya-biaya dalam industri. Di pihak lain, demokrasi menuntut hal-hal yang berlawanan dengan itu semua. Fasisme menyelamatkan kapitalisme dari dilema ini. Semua partai politik yang menghambat tujuan menghasilkan laba ini harus ditekan.[e]

Dalam era neoliberalisme yang berdasarkan logika waktu pendek ini maka tidaklah mengherankan negara-negara yang telah melakukan reformasi, salah satu yang muncul dalam penyelenggaraan negara adalah pembatasan masa jabatan seorang presiden. Lepas dari kontroversi baik atau buruk pembatasan jabatan presiden, hal ini menjadi mungkin dipaksakan di negara-negara yang *di*-reformasi, bukan karena kedigdayaan Amerika atau lainnya tetapi karena eranya adalah era produksi dengan logika waktu pendek, spekulasi keuangan.

Jika dilihat dari berbagai survey, contoh adalah hasil survey LSI yang dipublikasikan bulan Januari 2009, maka LSI menampilkan hasil surveinya itu dalam bentuk grafik yang mirip dengan grafik pergerakan harga saham di lantai bursa saham. Bulan sekian naik, beberapa bulan kemudian turun, naik lagi terkait dengan isu ini dan isu itu. Artinya adalah, dengan berbagai instrumen yang ada kita sedang di-disiplinkan, suka atau tidak, untuk membangun suatu masyarakat yang kompatibel dengan logika waktu pendek ini. Padahal, logika waktu pendek ini erat kaitannya dengan

upaya kelas kapitalis, kelas elit, kelas kaya untuk merestorasi kedudukannya yang akumulasi kekayaannya terus mengalami penurunan pada tahun-tahun 1960-1970an.

Lalu bagaimana dengan tesis *double movement*, gerakan ganda dari Karl Polanyi? Gerakan ganda yang dimaksud Karl Polanyi adalah ketika suatu pasar bebas, atau upaya akumulasi masuk masif ke dalam sekelompok masyarakat, maka akan ada upaya dari masyarakat tersebut untuk melindungi kepentingan-kepentingannya .[f]

Sejarah Indonesia menunjukkan fenomena di atas, yakni ketika pasar bebas (dalam arti kapital pertikelir) masuk secara bebas untuk yang pertama kalinya setelah Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*), Pernyataan Hak Tanah (*Domein Verklaring*) dan Undang-Undang Gula (*Suiker Wet*) ditetapkan pada tahun 1870 (yang pada dasarnya bisa disebut sebagai gelombang globalisasi yang pertama) maka respon kebangsaan muncul.[g] Produk hukum pertama dari Orde Baru adalah UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan sejarah kembali menunjukkan bahwa kapital partikelir kembali dibukakan pintu lebar-lebar untuk masuk. Hanya bedanya, respon kebangsaan tidak muncul. Orde Reformasi pada dasarnya masih dalam perahu yang sama, dan bisa kita lihat bagaimana gelombang privatisasi semakin menjadi-jadi di era reformasi ini. Respon kebangsaan sampai pada pemerintahan SBY-JK inipun juga tidak muncul.

Bagaimana kita sebagai bangsa ini dipaksa untuk setia terhadap pintu terbuka bagi kapital partikelir asing ini dapat dilihat dalam kasus Nurdin Halid, ketua Umum PSSI yang mengurus PSSI dari balik penjara karena kasus korupsi. Pemerintahan SBY-JK sampai sekarang tidak mampu membersihkan sampah busuk yang teronggok di halaman depan rumah bangsa ini. Alasannya? Jika pemerintah campur tangan, nanti akan kena sangsi dari FIFA, demikian kata Adyaksa Dault, Menpora dari Republik yang ditegakkan oleh darah pejuang kemerdekaan yang gagah berani dan tak pernah takut dan ragu.

Kenapa di era reformasi kekuatan penantang dominasi kapital partikelir pasar bebas ini juga tidak mewujud sebagai respon kebangsaan? Represi seperti saat Orde Baru jelas sudah sulit dilaksanakan lagi. Pasca perang dingin dan di-naik-an-nya isu Hak Asasi Manusia menjadi tidak mungkin dilakukan cara-cara represi. Satu per satu rejim diktator tumbang dan digantikan dengan demokrasi. Hanya saja kemudian timbul pertanyaan lagi, bagaimana mengatasi dilema antara kapitalisme dengan tujuan utamanya adalah profit dangan demokrasi yang tujuannya berlawanan dengannya?

Untuk itu demokrasi yang dikembangkanpun adalah demokrasi yang kompatibel dengan logika akumulasi laba dan logika dasar kapitalisme yang berkembang, logika dasar neoliberalisme yaitu demokrasi dalam logika waktu pendek. Misalnya dari sisi yang dipilih, logika waktu pendek ini adalah berarti juga logika *nir*-rekam jejak. Atau juga partai-partai baru yang timbul tenggelam tak karuan ujung pangkalnya, seakan muncul tiba-tiba dari kuburan.

Bagaimana demokrasi dalam logika waktu pendek bisa dikembangkan?

Yang dilakukan di awal adalah menjawab pertanyaan, siapa *stakeholders*, siapa yang terkait, yang berkepentingan langsung dengan demokrasi ini? Lepas dari pertanyaan siapa pihak-pihak yang ikut bermain dalam pesta demokrasi ini, maka yang terkait dengan penyelenggaraan demokrasi pertama adalah bangunan demokrasi itu sendiri – di mana penyelenggara termasuk di dalamnya, kedua adalah rakyat pemegang suara dan ketiga adalah partai politik.

Bangunan demokrasi, seperti yang kita lihat bersama adalah bangunan demokrasi prosedural atau yang lebih tepat adalah *poliarki*, seperti yang disebut oleh Robert Dahl. Mengenai rakyat pemegang suara, gambaran Sukardi Rinakit mengenai pemilih yang *melodramatik*, mudah lupa, mudah bosan dan mudah kasihan adalah ladang subur untuk masuk dalam demokrasi dengan logika waktu pendek.

Mengenai gerak masyarakat melindungi diri ketika pasar bebas semakin masuk, secara politik dilakukan oleh Orde Baru dengan melakukan represi, pengendalian partai dan massa mengambang. Ketiga hal upaya pendisplinan rakyat seperti itu tidak bisa dilakukan lagi dalam era reformasi ini. Bagaimana upaya pen-disiplinan rakyat sehingga tidak muncul gerakan melawan akumulasi pasar bebas ini? Menurut Michael Foucoult, upaya pendisiplinan dalam sejarahnya semakin tidak menyentuh tubuh. Maka bukan represi langsung pada tubuh yang mempunyai potensi melakukan gerak perlawanan, tetapi pada kesadaranlah yang didisiplinkan. Informasi adalah dasar pelaksanaan logika waktu pendek-nya neoliberalisme. Dan dengan informasi jugalah kesadaran rakyat didisiplinkan sehingga tidak melawan neoliberalisme.

Bagaimana informasi dapat mendisiplinkan rakyat? Informasi pada hakekatnya juga berarti *in-formasi* (*in-formatio*), jadi dia punya kekuatan untuk membentuk. Dan kalau kita perhatikan gejala sekarang ini, bentukan melalui informasi melalui media, terutama televisi, adalah tumbuhnya ketidakpercayaan dalam masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan perlawanan. Yang menjadi sasaran adalah kemampuan membangun komunitas. Yang menjadi sasaran adalah kemampuan membangun relasi. Ini adalah yang dilemahkan dalam aras rakyat dimana justru kelas kapitalis dalam upaya merestorasi kekayaannya ini kekuatannya ada pada relasi, pada hubungan-hubungan yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Volume spekulasi keuangan global yang meraksasa menjadi tidak mungkin jika tidak dikembangkannya teknologi informasi seperti sekarang ini. Juga fenomana merger antar perusahaan sehingga konsentrasi kapital ini semakin besar, bahkan volume penjualannyapun bisa melebihi GDP dari suatu negara.

Coba kita lihat berita televisi ketika menyampaikan berita tentang komunitas buruh saat melakukan demonstrasi, komunitas mahasiswa saat demonstrasi, tawuran antar komunitas, antar pelajar, antara komunitas kaki lima dengan satpol PP dan seterusnya. Juga berita-berita kematian, pembunuhan dan sejenisnya. Dua hal ini bisa berdampak, yang *pertama* rakyat semakin tidak percaya bahwa komunitas yang bermartabat dan mempunyai daya juang perlawanan bisa dibangun, dan

kedua adalah rakyat menjadi lelah. Kelelahan ini menjadikan rakyat tidak mudah untuk diajak membicarakan hal-hal yang sifatnya jangka panjang dan mendasar, dan akhirnya dalam berpolitik-pun pilihan-pilihan pragmatis jangka pendeklah yang menjadi dasar keputusannya. Belum lagi masalah di depan mata yang dihadapai masyarakat, masalah perut yang sampai sekarang lebih dikenyangkan oleh pameran mobil mewah dari kantor-kantor pemerintah.

Mengenai partai politik sudah banyak yang dibahas, tetapi satu hal yang penting adalah keterlibatan kapitalis partikelir yang akhirnya berhasil membangun olgarki di dalam partai politiklah yang akhirnya membuat partai politik berkembang menyesuaikan diri dengan bangunan demokrasi yang sudah dipersiapkan seperti disebut di atas.

Dari berbagai hal di atas, maka ketika pertengahan Januari 2009 di media televisi marak oleh iklan politik mengenai turunnya harga BBM, bahkan disebutkan BBM sampai turun 3 kali respon dari masyarakat ternyata cukup baik, dan ini dapat dilihat dari hasil survey yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan hasil survey ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Turunnya harga BBM sampai 3 kali dalam waktu yang singkat ini apakah hanya merupakan strategi kampanye pemerintahan SBY-JK atau khususnya Partai Demokrat? Ya, pasti ada unsur itu juga, tetapi sadar atau tidak apa yang dilakukan oleh pemerintah dan dimanfaatkannnya turunnya BBM sampai 3 kali dalam waktu singkat itu oleh Partai Demokrat sebagai kampanye adalah merupakan juga salah satu bentuk pendidikan bagi rakyat tentang logika pasar bebas. Turunnya BBM sebagai komoditas ini bisa turun atau naik sesuai dengan harga yang ada di pasar, bisa dalam waktu singkat atau cukup lama tanpa harus berpikir turun-naiknya harga itu karena masalah permintaan-penawaran atau sebagai gelembung hasil spekulasi para broker di bursa saham dan sejenisnya. Atau karena Pemerintah dan Pertamina korupsi, atau Pertaminanya tidak efisien atau tidak mampunya pemerintah lepas dari jeratan oligarki minyak.

Lepas dari berbagai perhitungan kritis yang menanggapi perhitungan harga BBM oleh pemerintah, seperti yang ditulis oleh Kwik Kian Gie (*lih.* www.koran-internet.com), ada hal yang penting yang perlu dicermati dari naik dan turunnya harga BBM ini, sekali lagi, yaitu bagaimana rakyat didisiplinkan untuk hidup dalam logika pasar dalam segala aspek kehidupannya. Apa yang dirayakan oleh masyarakat mengenai turunnya BBM ini berarti juga kita sedang merayakan pasar bebas. Rakyat tidak salah merayakan turunnya harga BBM, tetapi ketika dengan itu juga merayakan pasar bebas maka harus diingat siapa yang mengundang perayaan pasar bebas ini, yaitu –sayangnya, justru

penyelenggara negara yang dipilih oleh rakyat. Ujung cerita pilihan rakyat ini ternyata bukan *one man one vote*, tapi *one dollar one vote*. Sayangnya lagi, Partai Demokrat dengan dana yang tidak sedikit, aktif menyebar-luaskan undangan perayaan pasar bebas ini, dengan penuh kebanggaan.

Perlu sekali diingat pula bahwa proses demokratisasi negeri-negeri Amerika Latin di tahun 1980-an yang diikuti dengan penguatan 'demokrasi prosedural' terbukti telah membawa banyak negara tersebut pada 'krisis baru', yaitu peningkatan jumlah kemiskinan yang semakin massif. Hal ini bisa terjadi karena 'politik elektoral' yang berjalan didominasi oleh partai-partai politik pro-pasar bebas.[h] Juga berbagai bukti empirik melebarnya kesenjangan antara lapisan kaya dan lapisan miskin. Melihat ratio Gini, indikasi melebarnya kesenjangan di Indonesia semakin jelas dari tahun ke tahun sejak reformasi bergulir.

Mungkin jika dibuat undangan untuk perayaan pasar bebas ini, kepala suratnya pasti bukan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tetapi NNRI (Negara Neoliberal Republik Indonesia). Negara Neoliberal, menurut David Harvey adalah merupakan apparatus negara yang misi utamanya ialah memfasilitasi terciptanya kondisi-kondisi yang kondusif bagi akumulasi capital sehingga menguntungkan baik pihak capital dalam negeri maupun asing.[i] Jika diperhatikan berbagai Undang-Undang selama pasca reformasi 1998 ini, misalnya UU Sumber daya Alam, UU Penanaman Modal Asing, UU Migas dan yang terakhir UU Badan Hukum Pendidikan juga berbagai penjualan aset negara melalui privatisasi, maka apa yang ditulis oleh David Harvey tersebut sebenarnya telah berjalan di Indonesia. Dan kelihatannya, memang bukan NKRI yang menjadi dasar pijak pemerintahan SBY-JK ini, tetapi NNRI.

Greg Sudargo, Januari 2008

(Endnotes)

a Wlliam K. Tabb, *Tabir Politik Globalisasi*, Lafad Pustaka, Jogjakarta, Okt 2006, cet-2

b David Harvey, *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*, Resist Book, Jogjakarta, Januari 2009

c Michael Hudson, Super Imperialism – The Economic Strategy of American Empire, Pluto Press, 2003

d Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice*, George Allen and Unwin Ltd, London, 1951, cet-5

e *Ibid.*

f Karl Polanyi, *Transformasi Besar*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2003

g Lihat, Soedarjanto, www.pergerakankebangsaan.org

h Jurnal Wacana, Edisi 21, Tahun VI 2005, hal 6

i David Harvey, *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*, Resist Book, Jogjakarta, Januari 2009

Relasi Kolusif Partai-Partai Politik:

Kartel dan Pergeseran Koalisi

Dalam sebuah kutipan artikelnya, Katz dan Mair (1995) menegaskan bagaimana partai *catch-all* Eropa barat bergeser menjadi partai yang menerapkan suatu kartel. Partai kartel berhubungan dengan hubungan simbiosis dengan negara, mereka terasing dari masyarakat dan didominasi oleh pejabat publik. Aktifis partai hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap prosedur pengambilan kebijakan internal dan kampanye pemilu diorganisir oleh ahli-ahli profesional.[a] Partai-partai ini bersama-sama membentuk suatu kartel bila mana mereka memiliki kompetitor/pesaing yang baru dan pembagian dari lembaga yang 'dijarah'. Slater (2004) melihat fenomena paralel yang terjadi di Indonesia. Keberadaan kartel antara suatu hal lainnya diindikasikan dengan koalisi pelangi, lemahnya oposisi yang terorganisir pada kebanyakan parlemen, pengelakan terhadap pemilihan terbuka dan kurangnya kemauan untuk meruntuhkan korupsi. Ketika – menurut Slater (2004: 75) – kartel mengalami ancaman oleh kebijakan Abdurrahman Wahid yang sulit dipahami, yang mulai memecat menteri dan bahkan akhirnya berusaha untuk membubarkan Golkar, elit-elit politik yang bersekongkol bereaksi dengan meng-*impeachment* dan melengserkannya.

Kartel dalam beberapa segi merupakan akibat dari terfragmentasinya sistem partai dengan tidak adanya mayoritas.[b] Abdurrahman Wahid terpaksa membentuk koalisi besar pada Oktober 1999 karena partainya hanya mendapat 12.6% suara.[c] Setelah penggulingan pemerintahan Aburrahman Wahid pada bulan Juli 2001, Megawati sendiri pun bergantung pada dukungan dari beberapa partai yang kemudian diberikan posisi dalam kabinet. Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki dukungan dari partai politik yang kuat karena Partai Demokratnya hanya mendapat 7.5% suara.[d] Hanya ketika Yusuf Kalla menjadi Ketua Umum Golkar pada bulan Desember 2004 dan mulai menggiring partai ke pemerintahan Yudhoyono dan presiden mendapatkan mayoritas yang cukup dalam DPR.

Sulitnya membangun koalisi antar partai seringkali terjadi dalam sistem presidensial, khususnya bila dikombinasikan dengan multi partai. Kebuntuan eksekutif/legislatif *(deadlock)* kadang-kadang bisa jadi merupakan hasilnya (Mainwaring 1993). Di Indonesia, tendensi ini membawa DPR pada kemacetan yang sebenarnya pada 2001 selama proses *impeachment* terhadap Abdurrahman Wahid, dan hal ini terjadi lagi di akhir 2004. Tetapi stagnasi ini memberikan jalan terhadap pembentukan koalisi baru untuk menyelamatkan pemikiran-pemikiran yang mendasari kartelisasi.

Pergantian pada pucuk pimpinan Golkar diakhir 2004 dapat di interpretasikan sebagai manuver untuk mengamankan keuntungan memerintah di Jakarta, yaitu posisi didalam kabinet.[e]

Gerakan-gerakan di dalam partai mendelegasikan untuk memilih wakil-presiden, Yusuf Kalla, dan disisi lainnya Akbar Tanjung memberikan kesaksian tentang kekuatan politisi yang dipilih langsung dan mengingatkan pada oportunisme anggota parlemen di Filipina, yang berganti haluan ke kubu presiden baru segera setelah pemilu selesai.[f]

Indikasi paling jelas dari organisasi ke-kartel-an partai politik adalah keganjilan mekanisme pengambilan kebijakan yang dinamakan 'musyawarah mufakat', yang menonjol di parlemen Indonesia. Menurut prosedur dan aturan DPR (Peraturan Tata Tertib DPR-RI, 2001), kebanyakan keputusan pada komisi dan rapat pleno DPR diambil dengan secara mufakat (konsensus) dan tanpa pemungutan suara *(voting)*. Hal ini menyebabkan keterlambatan dan membuatnya sangat sulit bagi publik dan bahkan pengamat politik untuk melacak sikap-sikap politik dari sebagian partai dalam beberapa isu-isu politik (Sherlock, 2005). Bahkan bila partai menyampaikan pandangannya kepada publik dari waktu ke waktu, mereka seringkali berubah secara tak terduga dalam posisi yang kontradiktif. Di DPR-RI, sebagai contoh, pemotongan subsidi BBM ditolak oleh PPP, PKS, PAN dan PKB, tetapi akhirnya mereka semua mundur. Taktik pertama menentang dan akhirnya kooperatif telah diulangi berulang kali, sebagaimana pada kasus rencana penyelidikan (hak angket & interpelasi) terhadap impor beras dari Vietnam, dengan PKS yang jadi satu-satunya pengecualian, dan pembelian 32 kendaraan lapis baja buatan Prancis yang tanpa ditawarkan ke publik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyatakan, bahwa kegemaran anggota dewan berdebat panjang, bergaya dalam aksinya, dan berbicara menentang kebijakan pemerintah, tetapi umumnya disokong tagihan untuk kritik setelah kesepakatan-kesepakatan dibelakang ruangan.[g]

Andi YW

(Catatan)

a Poin yang terakhir diilustrasikan dengan baik oleh Mietzner (Opportunities, pitfalls of RI's new democracy, Jakarta Post, 16.10.2006) dalam analisisnya tentang meningkatnya pengaruh polling opini di Indonesia dalam membentuk perilaku elit partai politik.

b Berdasarkan rasio, fregmentasi partai politik di Indonesia bukanlah sebuah akibat tetapi suatu sebab dari sistem proporsional. Pemilihan pemakaian sistem ini setelah kemerdekaan dan lagi-lagi pada 1998/1999 merupakan hak dari sejumlah besar aktor politik. Perkenalan dari sistem mayoritas kelihatannya lebih memungkinkan jika hanya terdapat dua pelaku utama (Nohlen 2004: 408 dan 415).

c Koalisi umumnya tidak didasarkan pada kontrak pasti membentuk tujuan pemerintahan dan kepentingan khusus partai sebagai anggota koalisi tersebut. Kerjasama diantara partai berubah-ubah dan sangat bergantung dari hasil pergulatan kekuasaan pada partai tersebut.

d Dia berusaha mempengaruhi partai-partai lainnya. Tetapi maju pada putaran kedua pemilihan presiden, Golkar, dibawah kepemimpinan Akbar Tanjung, memutuskan untuk berdampingan dengn Megawati, walaupun Yusuf Kalla merupakan pasangan SBY. Setelah kemenangan SBY dan Kalla, tanda-tanda polarisasi muncul antara "Koalisi Kerakyatan" SBY, yang terdiri dari PD, PAN, PPP, PKS seperti halnya partai kecil lainnya yang terkelompok dalam faksi bintang pelopor demokrasi, dan "Koalisi Kebangsaan", yang dibentuk oleh PDI-P, Golkar, PDS dan PBR dengan dukungan dari PKB. Isu-isu utama yang tercipta dari 11 ketua sub komite parlemen dan pertemuan para petinggi TNI. Beberapa menteri dalam kabinet SBY tidak diakui oleh partai mereka sendiri. Pada Oktober 2004, PPP juga meninggalkan "Koalisi Kebangsaan", alih-alih karena dua anggota PPP – Suryadharma Ali dan Soegiharto – diterima sebagai menteri oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

e Secara keseluruhan, lihat Tomsa (2006: 17)

f Tetapi tidak seperti politisi Filipina, politisi di Indonesia sukar berpindah partai, setidaknya pada tingkat nasional.

g House faces criticism for bowing to government, Jakarta Post, 28.9.2006.

Kejahatan Korporatokrasi di Indonesia

Oleh: Budiarto Shambazy

Kata Pengantar pada Buku *"Pengakuan Bandit Ekonomi, kelanjtan Kisah Petualangannya di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga"*, UFUK Press, Agustus 2007

John Perkins adalah penulis asal Amerika Serikat (AS) yang mengungkapkan kejahatan korporatokrasi yaitu jaringan yang bertujuan memetik laba melalui cara-cara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari Negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Dalam bukunya yang pertama, *Confessions of An Economic Hit Man* (2004) Perkins menyebut dirinya Bandit Ekonomi atau EHM yang bekerja di perusahaan konsultan MAIN di Boston AS.

Cara kerja mereka mirip mafia karena menggunakan semua cara, termasuk pembunuhan, untuk mencapai tujuan. Ia mengungkapkan badit-bandit ekonomilah yang melenyapkan Presiden Panama Omar Torrijos dan Presiden Ekuador Jaime Roldos. "Kita melakukan pekerjaan kotor. Tak ada yang tahu apa yang kamu lakukan, termasuk istri kamu. Kamu ikut atau tidak? Kalau mau, kamu dilarang keluar dari MAIN sampai meninggal dunia," kata bos Perkins yang suatu hari raib ibarat hantu.

Tugas pertama Perkins membuat laporan-laporan fiktif untuk IMF dan World Bank agar mengucurkan utang luar negeri kepada negara-negara Dunia Ketiga.

Tugas kedua Perkins membangkrutkan negeri penerima utang. Setelah tersandera utang yang menggunung, negara pengutang dijadikan kuda yang dikendalikan kusir. Negara pengutang ditekan agar, misalnya, mendukung Pemerintahan AS dalam voting di Dewan Keamanan PBB. Bisa juga negara pengutang dipaksa menyewakan lokasi untuk pangkalan militer AS. Sering terjadi korporatokrasi memaksa negeri pengutang menjual ladang-ladang minyak mereka kepada MNC (*multinational corporation*) milik negara-negara Barat.

Selama tiga bulan pada tahun 1971, Perkins berkeliling ke berbagai tempat menyiapkan dongeng tentang pembunuhan ekonomi, pendapatan perkapita (GNP), dan berbagai indikator lain yang dipalsukan dan dilaporkan kepada IMF dan World Bank. Para eksekutif kedua lembaga itu pura-pura terpesona kepada berbagai indikator yang angkanya dicatut para bandit ekonomi itu dan segera menyalurkan utang.

Bos Perkins, Charlie Illingworth mengingatkan Perkins bahwa Presiden AS Richard Nixon menginginkan kekayaan alam Indonesia diperas sampai kering. Di mata Nixon, Indonesia ibarat *real estate* terbesar di dunia yang tak boleh jatuh ke tangan Uni Soviet atau China. "berbicara tentang minyak bumi, kita tergantung dari Indonesia. Negara ini bisa jadi sekutu kuat kita,"kata Illinhworth kepada Perkins di Bandung.

Eksistensi korporatokrasi disambut hangat para pejabat tinggi Orde Baru. Korporatokrasi membuka peluang emas untuk KKN. Konspirasi antara korporatokrasi dengan kleptokrasi Orde Baru dijalin melalui prinsip "tahu sama tahu" dalam rangka "pembangkrutan" (bukan pembangunan) Indonesia. Konspirasi inilah yang mengawali berputarnya lingkaran setan utang yang dielu-elukan ideologi pembangunan Orde Baru.

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur itu bertujuan merebut laba maksimal bagi perusahaan-perusahaan AS. Tujuan lainnya memperkaya elite Orde Baru dan keluarganya agar mereka tetap loyal kepada korporatokrasi. Utang yang semakin menggunung akan semakin meguntungkan persengkongkolan itu. Dan Perkins pun dinyatakan lulus sebagai bandit ekonomi andal berkat kariernya yang sukses di Indonesia.

* * *

Sebagai ekonom utama di MAIN, Perkins memberikan rekomendasi jumlah utang yang disalurkan IMF dan World Bank. Salah satu syaratnya pemerintah harus menyalurkan 90 persen dari utang itu ke kontraktor-kontraktor AS untuk membangun berbagai proyek infrastruktur seperti jalan raya atau pelabuhan yang dikerjakan para pejabat tingi Orde Baru dan keluarganya. Jika Presiden Soekarno menentang kehadiran korporatokrasi, Presiden Soeharto sebaliknya. Tak heran utang luar negeri Soekarno tak lebih dari 2,5 milyar dolar AS, sebaliknya utang luar negeri Soeharto lebih dari 100 milyar dolar AS.

Kongkalikong korporatokrasi dengan kleptokrasi tampak dari proyek

Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Paiton I dan II yang nilainya 3,7 milyar dolar AS. Megaproyek ini tak bermanfaat sebab harga listrik yang dihasilkan 60 persen lebih mahal dari pada di Filipina atau 20 kali lebih mahal dibandingkan di AS. Dana pembangunan Paiton berasal dari utang yang disalurkan ECA (*export credit agencies*) asal negara-negara maju. Korupsi Orde Baru dimulai ketika 15,75 persen saham megaproyek itu disetor kepada kroni dan keluarga Soeharto.

Kontrak-kontrak Paiton, mulai dari pembebasan lahan sampai monopoli suplai batu bara, dihadiahkan tanpa tender kepada konspirasi korporatokrasi dengan kleptokrasi. Setelah Soeharto *lengser ing keprabon* ketahuanlah nilai proyek Paiton terinflasi 72 persen. Pemerintah-pemerintah pasca Soeharto coba negosiasi ulang Paiton dengan argumen megaproyek itu adalah hasil KKN. Akibatnya Indonesia selama 30 tahun harus membayar ganti rugi 8,6 sen dólar AS per kWh walaupun kemampuan pemerintah cuma dua sen dóllar AS per kWh.

Soekarno bersikap tegas menghadapi korporatokrasi. Pada awal dekade 1960, minyak bumi mencakup seperempat dari total ekspor dan didominasi MNC yang menanam modal 400 juta dóllar AS. Caltex (AS) menguasai 85 ekspor, Stanvac (AS) 5 persen, dan Permina 10 persen. Pada tahun 1963, total ekspor mencapai 94 juta barrel per tahun atau 1,7 persen dari konsumsi dunia.

Sejak 1951 Soekarno membekukan konsensi bagi MNC melalui Undang-undang No 44/1960 yang berbunyi,"Seluruh pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara." Sejak merdeka, MNC berpegang pada perjanjian *let alone agreement* yang memustahilkan nasionalisasi dan mewajibkan MNC mempekerjakan pribumi lebih banyak daripada asing.

Pembekuan konsensi membuat MNC kelabakan karena laba menurun. Tiga Besar (Stanvac, Caltex, dan Shell) meminta negosiasi ulang, namun Soekarno mengancam akan menjual seluruh konsensi ke nagara-negara lain jika mereka menolak UU 44/1960. Pada bulan Maret 1963 Soekarno mengatakan,"Aku berikan Anda waktu beberapa hari untuk berpikir dan aku akan batalkan semua konsensi jika Anda tidak mau memenuhi tuntutan aku."

* * *

Soekarno menuntut Caltex menyuplai 53 persen dari kebutuhan domestik yang harus disuling Permina (kini pertamina). Surplus produksi Tiga Besar harus dipasarkan ke luar negeri, Surplus produksi Tiga Besar harus dipasarkan ke luar negeri, dan semua hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Caltex wajib menyerahkan fasilitas distribusi dan pemasaran dalam negeri kepada pemerintah, dan biaya prosesnya diambil dari laba ekspor mereka. Caltex harus menyediakan dana dalam bentuk valuta asing yang dibutuhkan

pemerintah untuk membiayai pengeluaran serta investasi modal yang dibutuhkan Permina.

Soekarno menuntut Caltex menyuplai kebutuhan minyak tanah dan BBM dalam negeri. Formula pembagian laba ditetapkan 60 persen untuk pemerintah dalam mata uang asing dan 40 persen untuk Caltex yang dihitung dalam upiah. Berbagai tuntutan Soekarno membuat Caltex panik, dan mereka meminta bantuan dari Presiden AS John F. Kennedy. Padahal pemerintah baru mau menandatangani program paket stabilisasi IMF yang ditawarkan Kennedy.

Sehari setelah penandatanganan paket IMF itu, Soekarno menerbitkan Regulasi 18 yang berisi berbagai tuntutannya. Soekarno menolak paket stabilisasi IMF dikaitkan dengan Regulasi 18. Setelah melewati negosiasi alot, Soekarno dan Kennedy menyepakati sistem kontrak karya. Sistem ini menegaskan pemerintah memiliki kedaulatan atas kekayaan minyak bumi sampai komoditas itu diangkut ke tempat penjualan (*point of sale*).

MNC cuma berstatus sebagai kontraktor dan jangka waktu serta area lokasi dibatasi dibandingkan dengan versi *let alone agreement*. MNC menyerahkan 25 persen area eksplorasi setelah 5 yahun dan 25 persen lainnya setelah 10 tahun. Pembagian laba tetap 60:40 persen. MNC wajib menyediakan kebutuhan pasar domestik dengan harga tetap dan menjual aset distribusi serta pemasaran setelah jangka waktu tertentu. MNC menerima kontrak karya, Kennedy dan Kongres AS menyetujui paket stabilisasi IMF yang oleh Soekarno diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Nasional (RPN) Ketiga 1961-1969.

Bandingkan kontrak karya dengan sistem PSA (*profit sharing agreement*) versi Soeharto. PSA seolah-olah menempatkan pemerintah sebagai pemilik, sementara MNC kontraktor. Padahal pada praktiknya MNC yang mengontrol ladang minyak yang mendatangkan laba berlipat ganda. PSA seolah-olah pembagian hasil yang adil, padahal tidak. Klausul stabilisasi PSA mengatakan seluruh UU tidak berlaku bagi kegiatan MNC dalam ranagka mencari laba dan tak bisa jadi rujukan jika sengketa terjadi – yang menjadi rujukan hukum internasional yang tak kenal kedaulatan atau kepentingan nasional.

Cerita sukses sistem PSA di Indonesia dipraktikkan korporatokrasi untuk menguasai minyak bumi Irak era pasca presiden Saddam Hussen. Irak diserbu pasukan AS lewat dongeng tentang senjata pemusnah massal yang tak pernah ada untuk membuka jalan bagi masuknya korporatokrasi... ***

"MAFIA BERKELEY"

MENGHEGEMONI KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA (1966-2006)

Oleh: Delly Maulana[a]

Pendahuluan

Istilah mafia berkeley lahir dari sebuah *epistemic community* yang dibidani oleh *Ford Foundation* dan *Rockefeller Foundation*. Pada tahun 1950-1960 keduanya membidik para mahasiswa cerdas Indonesia untuk disekolahkan ke University of California, Berkeley. Kepentingan AS sangat jelas, mengganjal laju komunisme dan paham ekonomi Indonesia. Dari sana, lahirlah Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang kerap dijuluki "Begawan ekonomi Indonesia." Generasi berikutnya diperankan oleh Prof. Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, dan JB Sumarlin. Kini, mahzab itu – sengaja atau tidak sengaja – terwariskan kepada figur-figur yang pernah dan sedang berada di pusat kekuasaan, seperti Dorojatun Kuntjorojakti, Yusuf Anwar, Boediono, Sri Mulyani, atau bahkan ekonom Musa yang tidak sekolah di Berkeley, semacam Chatib Basri dari LPEM UI.[b]

Pada awal orde baru, para ekonom lulusan *University California Berkeley* tersebut memang sangat harum namanya. Meraka, yang kala itu rata-rata masih berusia di bawah empat pulu tahun, dipandang telah berhasil dengan gemilang menyelamatkan perekonomian Indonesia dari bahaya kehancuran yang diwariskan oleh pemerintahan Soekarno. Dengan bantuan IMF, mereka berhasil menekan inflasi dari sekitar 600 persen pada tahun 1966 menjadi di bawah 10 persen pada tahun 1969. Mereka juga berhasil membekukan pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun, menggalang pembuatan utang luar negeri baru, dan menggenjot masuknya investasi asing secara besar-besaran.

Nyaris tidak ada kasus sejenis di dunia, dimana satu kelompok ekonom berkuasa selama 40 tahun nyaris tidak henti dari 1966-2006, menentukan arah strategi, dan kebijakan ekonom satu negara. Indonesia telah mengalami pergantian presiden 5 kali sejak tahun 1966, perubahan sistem struktur politik, pergantian pimpinan sipil maupun militer, reformasi tentara, tetapi pleaku perumus kebijakan ekonomi (mafia berkeley) nyaris tidak berubah selama 40 tahun. Tidak aneh tidak ada terobosan inovatif dalam strategi dan kebijakan ekonomi sehingga Indonesia semakin ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya di Asia. Kelompok tersebut dikenal dengan sebutan "Mafia Berkeley" karena kebanyakan dari generasi pertamanya lulusan program khusus di University Berkeley, California.

University Berkeley sendiri merupakan salah satu universitas terkemuka di AS dan para mahasiswanya terkenal progresif, serta anti perang Vietnam. Tetapi program untuk Mafia Berkeley dirancang khusus untuk orang Indonesia yang dipersiapkan untuk dikemudian hari menjadi bagian dari hegemoni global AS. Disebut Mafia Berkeley mengambil ide dari organisasi kejahatan terorganisir di AS, karena mereka secara sitematis dan terorganisir menjadi alat hegemoni dan kepentingan global di Indonesia

Mafia Berkeley Sebagai Kekuatan Rezim

Apabila dilihat dari rezim sebagai sebuah prosedur pembuatan keputusan dalam hal ini pembuatan keputusan Indonesia untuk mengadopsi rezim ekonomi liberal yang digawangi oleh IMF *(International Monetry Fund)* dan CGI *(Consultative Group for Indonesia)* merupakan konsorsium negara-negara dan lembaga-lembaga kreditor dan donor untuk Indonesia yang dibentuk pada tahun 1992 sebagai pengganti konsorsium yang sama, yaitu IGGI *(Inter-Governmental Group on Indonesia)*. CGI terdiri dari sekitar 30 kreditor bilateral dan multilateral diantaranya World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), International Monetery Fund (IMF), dan Pemerintah negara industri, seperti Jepang, AS, United Kingdom, dan lain-lain.

Seperti halnya dengan IMF, selama ini Indonesia memerlukan CGI untuk memperoleh hutang yang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran (APBN). Oleh karena itu, pertemuan CGI adalah bagian dari ritual yang biasanya dilakukan dalam masa-masa ketika Pemerintah Indonesia harus melawati proses konsultasi dengan CGI. Proses konsultasi ini akan menghasilkan penilaian terhadap kinerja ekonomi Indonesia dan seberapa besar Pemerintah Indonesia mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati pada pertemuan CGI sebelumnya. Penilaian ini akan menentukan besarnya pinjaman dan persyaratan-persyaratan berikutnya yang harus dipenuhi.

Praktek-praktek yang dilakukan oleh CGI juga mulai mengajukan prasyarat-prasyarat yang cukup mengganggu kedaulan Indonesia dalam pemberian pinjamannya yang sejalan dengan agenda-agenda IMF, seperti tercantum dalam LOI *(letter of intent)* tahun 1999. Dilihat dari kerditor utamanya, Bank Dunia, IMF, dan ADB, serta Jepang-maka CGI juga mewakili kepentingan dan agenda dari institusi keuangan Internasional. Berbahayanya,

CGI adalah kartel kreditor sehingga posisi tawar Indonesia dibandingakan dengan negara lain jika bernegosiasi secara bilateral-cenderung lemah.[c] Keputusan untuk menggantungkan ekonomi Indonesia pada IMF dan CGI dipromotori oleh "Mafia Berkeley". Mafia Berkeley merupakan epistemic community yang diartikan sebagai suatu jaringan orang-orang profesioanl yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam suatu bidang keilmuan yang memilki otoritas untuk mengusulkan atau membuat kebijakan ekonomi berdasarkan keilmuannya. Ketika negara memiliki kemampuan untuk mendefinisikan kepentingan, maka negara akan meminta bantuan orang-orang yang ahli.

Mafia Berkeley merapat dan mengabdi selama 32 tahun kepada rezim otoriter Soeharto. Banyak dari anggotanya yang menduduki posisi-posisi kunci dalam bidang ekonomi dan menjadi saluran strategi kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia, dan USAID. Mafia Berkeley sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memonitor agar kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dan searah dengan kebijakan umum ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakan ini dikemudian hari dikenal dengan Washington Konsensus", yang terdiri dari:

1. Kebijakan anggaran yang ketat

   Kebijakan anggaran ketat, selain untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudakan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang. Bahkan pengahapusan subsidi untuk rakyat, seperti untuk pendididikan, kesehatan, perumahan, UKM, dipaksakan hanya agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang. Pembayaran utang adalah suatu keharusan, sementara anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah urusan belakangan.

2. Liberalisasi keuangan

   Liberalisasi keuangan untuk mempelancar transaksi global dan menjamin modal dan dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang.

3. Liberalisasi industri dan perdagangan

   Liberalisasi industri dan perdagangan memudahkan negar-negara maju mengekspor barang dan jasa ke negara berkembang. Tetapi negar-negar maju sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kouta, kebijakan anti dumping, eksport restraint, subsidi dan hambatan non-tarif.

4. Privatisasi

   Privastisasi atau penjualan aset-aset milik negara dimaksudkan agar peran negara di dalam ekonomi-berkurang sekecil mungkin.[d] Dalam prakteknya program penjualan aset-aset negara tersebut dilakukan dengan harga sangat murah sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan rampokisasi seperti diungkapkan Prof. Marshall I. Goldman dari Harvard. Dalam

prakteknya, kebijakan konsensus Washington sering dipaksakan sekaligus kepada negara berkembang tanpa tahapan, fleksibilitas, dan persiapan untuk memperkokoh kekuatan ekonomi domestik. Sekilas program Washington Konsensus tersebut sangat wajar dan netral, namun demikian dibalik program tersebut tersembunyi kepentingan negara-negara maju yang merupakan kreditor utama utang luar negeri Indonesia atau negara dunia ketiga lainnya.[e]

Hal penting yang dilakukan oleh Mafia Berkeley adalah memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia untuk mengundang keterlibatan IMF dlam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Kesepakatan antara IMF dan Pemerintah Indonesia terjadi pada tanggal 31 Oktober 1997 dengan ditantanganinya *Letter of Intens* (LoI) pertama yang berisikan perjanjian 3 tahun dan kucuran utang sebesar US$ 7,3 milyar. Namun kehadiran IMF justru mengakibatkan parahnya ekonomi Indonesia. Dan tidak lebih dari satu tahun terjadi pelarian modal *(Capital Flight)* sehingga menyebabkan pengangguran, kondisi ini semakin bertambah akibat terjun bebasnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Pada tahun 1998 lebih adri 50 % pendudukIndonesia hidupdi bawah garis kemiskinan. Salah satu resep kebijakan IMFuntukmenutup 16 Bank membuat masyarakat panik dan menarik uangnya di Bank-Bank nasional dan disebagian Bank Asing, untuk mengatasi goncangan ini IMF kembali membuat rekomendasi kebijakan yang mengharuskan pemerintah mengucurkan dana trilyuanan rupiah untuk memperbaiki kecukupan modal pada Bank-Bank yang bermasalah tersebut melalui obligasi rekap. Keterlibatan IMF tersebut membuat krisis ekonomi di Indonesia menjadi lebih dalam dan parah. Tanpa keterlibatan IMF, krisis ekonomi akan tetap terjadi di Indonesia tetapi skalanya akan relatif lebih kecil (pertumbuhan ekonomi antara – 2% sampai 0 %) pada tahun 1998, tetapi keterlibatan IMF telah mengakibatkan ekonomi Indonesia anjlok luar biasa, yakni -12,8 % pada tahun 1998. Biaya sosial ekonomi dari krisis tersebut dalam bentuk kerusuhan sosial (IMF-*Provoked Riots*), peningkatan puluhan juta pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitalisasi bank lebih dari Rp.600 triliun, serta tambahan beban hutang puluhan milyar dolar masih terasa sampai saat ini. Dokter yang diminta menyembuhkan penyakit pasien gagal, dengan berbagai melakukan amputasi yang tidak perlu sehingga membeban-

kan biaya kepada sang pasien.[f]

Subordinasi kepentingan rakyat dan nasional kepada kepentingan global sepertinya dirancang oleh Mafia Berkeley, sehingga mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam perumusan strategi kebijakan ekonomi. Indonesia juga tidak memliki fleksibilitas untuk merumuskan strategi kebijakan kerena terpaku pada model generik dan rumusan tunggal dari Washington Konsensus, IMF, dan Bank Dunia. Padahal model generik tersebut dirancang terutama untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi global sehingga tidak aneh apabila negara-negara yang mengikutinya justru akan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan nasionalnya. Hasil tipikal dari model pembangunan Washington Konsensus, IMF, dan Bank Dunia adlah siklus terus menerus dari krisis ekonomi dan akumulasi hutang, sperti yang terjadi di negara-negara Amerika Latin tahun 1970-2000, Afrika, dan Indonesia.

Krisis ekonomi biasanya diselesaikan hanya dengan menambah beban hutang yang kemudian akan kembali menjadi sumber krisis baru.[g]

Cara Kerja Mafia Berkeley

Cara kerja utama dari Mafia Berkeley adalah mengabdi kepada kekuasaan apapun, tidak penting apakah pemerintahan tersebut bersifat otoriter, pelanggar hak asasi manusia, ataupun KKN. Mafia Berkeley kemudian menjadi corong hubungan masyarakat diberbagai forum dan media untuk memperlunak dan mempermanis rezim. Efektifitas hubungan media Mafia Berkeley terutam dilakukan dengan memberikan akses khusus, dalam bentuk bocoran informasi dan dokumen-dokumen rahasian kepada satu media harian atau suatu media mingguan terkemuka. Diskriminasi akses informasi tersebut merupakan tindakan tidak fair dalam kompetisi pers di Indonesia. Kedua media tersebut memliki pandangan yang sangat liberal dalam bidang politik dan sosial, tetapi sangat konservatif dalam bidang ekonomi: Bagaikan partai demoktrat di AS dalam bidang politik dan sosial, tetapi bagaikan partai republik dalam bidang ekonomi.

Pola rekruitmen Mafia Berkeley dilakukan dengan mengandalkan prinsip utama loyalitas dan feodalisme, di atas kriteria profesionalisme. Dengan prinsip tersebut, kepatuhan dan loyalitas anggota, murid, dan cucu-cucu Mafia Barley dapat terus dipertahankan. Kaderisasi kemudian dilanjutkan dengan kesamaan cara berfikir. Kemudian kader-kader Mafia Berkeley dibe-

rikan kesempatan untuk menjadi Ketua Departemen, Dekan, Ketua Lembaga Penelitian ekonomi, dan sebagainya. Penunjukan jabatan struktural akedemis tersebut biasanya diberikan kader yang lebih loyal dan patuh, dan bukan yang paling mampu secara akedik untuk menjadi komisaris BUMN-BUMN, walaupun terbukti kinerja BUMN selama nyaris 40 tahun dibawah pengaruh Mafia Berkeley tidak pernah menunjukkan kinerja yang baik. Di samping itu para kader diberikan berbagai bonus dengan kompensasi finansial. Dengan struktur dan skala pendapatan yang bekali-kali lipat.

Lembaga-lembaga akademik dan penelitian yang dikontrol dan menjadi instrumen Mafia Berkeley dikelola dengan prinsip loyalitas, feodalisme dan kepatuhan. Sumber pembiayaan utama dari lembaga-lembaga yang dikontrol Mafia Berkeley, terutama berasal dari hibah IMF, Bank Dunia, USAID, dan lembaga kreditor Internasional lainnya. Tidak aneh jika hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penelitian dan akedemik tersebut sejalan dengan rekomendasi Washington Konsensus, IMF, dan Bank Dunia, serta USAID. Inilah salah satu mekanisme sosialisasi publik untuk mengecoh orang awam sehingga kesannya penelitian tersebut bersifat independen atau netral. Untuk memperkuat pandangan yang baik di dalam maupun luar negeri, Mafia Berkeley melalui lembaga-lemabaga yang diontrolnya, termasuk Departemen-Departemen teknis biasanya memperkerjakan konsultan asing yang dibiayai anggaran non-budgeter atau pinjaman atau hibah dari IMF, Bank Dunia, dan USAID. Kemudian para konsultan menjadi mesin *public relation* yang terus menerus memuji kehebatan Mafia Berkeley dalam bentuk penulisan buku, artikel, maupun wawancara di media massa.[h]

(Catatan)

a Koordinator Pendidikan dan Pelatihan CSCS Indonesia dan Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Pemerintahan Prima Graha Banten.
b www.republikaonline.com *"Menggugat Mafia Berkeley*", 6 Januari 2006.
c Down to Earth Factsheet LKI 32, Maret 2004_CGI_Jalan pintas atau jalan lain_ htm
d Joseph E. Stigliz (2002), "Washington Konsensus (Liberalisasi, Deregulasi, Privatisasi) arah menuju jurang kemiskinan". INFID.
e http: //www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoo.group.com/msg05871. html
f Barwir, Ravirsond. Mafia Berkeley dan krisis ekonomi Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 49
g *Ibid.* hal. 20
h www.dua berita.com News Portal Nomor 2 Indoesia-Mafia Berkeley (Kegagalan Indonesia Menjadi Nagera Besar di Asia. mht

Revolusi Hijau:

Dari Perangkap Involusi Ke Perangkap Globalisasi

Keberhasilan Orde Baru dalam mengangkat pertanian adalah kegagalannya menyelesaikan persoalan dasar dari pertanian itu sendiri yaitu pemerataan dan penataan agraria atau sering disebut **pembaharuan agraria**.

Pembaharuan agraria menyangkut pembagian tanah dan alokasinya sehingga cukup untuk kehidupan keluarga dengan anggota lima. Selain itu juga penataan kelembagaan ekonomi. Tanpa pembaharuan agraria, seluruh usaha teknologis dan moneteris hanya berakhir dengan penciptaan ketimpangan baru. Dan ketimpangan tersebut telah mendorong petani berlahan luas untuk tidak merasa bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan, karena mereka lebih dirangsang oleh mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari pada tanggung jawab sosial dan generasi. Sedang petani gurem tidak mampu untuk membiayai konservasi lahan, dari lahan sarat kimia menjadi lahan bersih darinya seturut kaidah pertanian organik.

Maka Revolusi Hijau kendati semula seperti dewa penyelamat, yakni membebaskan petani Indonesia keluar dari perangkap involusi pertanian, tetapi pada akhirnya ia hanya mengantarkannya ke tempat pembantaian ekonomi, masuk perangkap lainnya, perangkap globalisasi yang dituntun oleh ideologi neoliberalisme. Akhirnya

empat tujuan pengembangan pertanian, mengurangi pengangguran, menghapus kemiskinan, menjembatani ketimpangan pembagian pendapatan dan konservasi lingkungan jauh daripada tercapai kalau tatanan agraria tidak diperbarui menuju ke yang lebih berpihak dan bergulir dari rakyat. (*Francis Wahono*)

Sumber: I. Wibowo, Francis Wahono, ***Neoliberalisme,*** Cindelaras Pustaka Cerdas, Jogjakarta, 2003

Carut Marut Pendidikan

Mulai 1 Januari, Sekolah [di Jakarta] Masuk Pukul 06.30, demikian Kompas 21 November 2008. Meskipun menuai kontroversi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memajukan jam masuk sekolah dari pukul 07.00 menjadi 06.30. Kebijakan ini dimaksudkan bukan hanya untuk mengurangi beban kemacetan, melainkan juga berdampak baik bagi kesehatan siswa. Keputusan ini menimbang dari masukan PT Pamintori Cipta sebagai konsultan bidang transportasi. Elin Diana, Kompas 5 Desember 2008 menuliskan bahwa jika jadi sekolah masuk jam 06.30, maka DKI Jakarta akan masuk "Rekor Dunia" dalam hal jam masuk sekolah.

Apa yang membuat berita ini patut kita analisis lebih lanjut? Bukan pertama-tama soal jam masuk yang maju, yang sebenarnya sudah nampak jelas bahwa keputusan memajukan jam sekolah tersebut akan merugikan murid dan orangtua murid, tetapi adalah apa yang ada di kepala orang-orang yang duduk di pemerintahan itu!

PT Pamintori Cipta sebagai konsultan bidang transportasi, dengan segala perangkat survey-nya akan melihat hal terkait dengan transportasi ini pasti titik beratnya pada masalah teknis belaka, dan itu mestinya hanya merupakan salah satu masukan bagi pemerintah dalam membuat keputusan politiknya. Hal lain dan utama sebagai pertimbangan pemerintah adalah mestinya amanat konstitusi.

Selama pemerintahan era reformasi ini, termasuk juga masa SBY-JK, belum pernah muncul greget yang betul-betul serius mengenai pendidikan. Perdebatan mengenai

alokasi 20% APBN untuk anggaran pendidikan hanya menjadi komoditas politik yang tidak pernah menyentuh dasar permasalahan mengenai pendidikan, yaitu komitmen yang jujur, sungguh-sungguh dan terus menerus untuk menjadikan pendidikan sebagai dasar bagi mengangkat kesejahteraan, harkat dan martabat bangsa. Contoh aktual, *ya* Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta dengan sederet gelar akademis ini.

Dengan majunya pendidikan, dengan semakin banyaknya kaum terdidik, semakin berkembangnya kualitas pendidikan, bangsa ini akan mempunyai kemampuan lebih dalam membangun relasi yang sejajar dalam kesaling-ketergantungan antar bangsa. Membangun pendidikan dengan komitmen yang kuat, pantang menyerah dan sadar betul tentang aspek strategis pendidikan pada dasarnya kita sedang membangun 'gudang peluru' melawan eksploitasi, baik dalam hal eksploitasi produksi maupun dalam eksploitasi konsumsi. Ingat, bagaimana sejarah pergerakan nasional berhasil meraih dan mewujudkan kemerdekaan!

Bangsa lain sangat serius dalam pendidikan ini, baik dari Venezuela, China maupun negara-negara yang sudah maju. Komitmen yang serius, cerdas, kritis dan pantang menyerah terhadap pendidikan ini sebenarnya dapat menjadi salah satu tolok ukur penting sejauh mana pemerintah mempunyai keberanian menantang dominasi modal, terutama cengkeraman modal asing.

Beranikah kita? Atau kita beraninya hanya dalam ber-iklan ria, masuk salon politik sebentar, merias diri hanya untuk menang dalam pemilu? Atau seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Lubis kira-kira 30 tahun yang lalu, kita bangsa yang tidak mau bertanggung jawab? Kegagalan membangun transportasi massal demi untuk mengabdi kepentingan capital otomotif asing, justru pendidikan anak bangsa yang dikalahkan.

Masa depan bangsa ini terlalu mahal untuk diserahkan pada pemimpin yang *nir*-karakter!***

Menyoal Kembali Kesetaraan Gender

Oleh: Gugup Tasjuwan

Diskriminasi terhadap Perempuan telah banyak terjadi selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad yang lampau. Diskriminasi terhadap perempuan dapat diartikan sebagai setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang bertujuan atau berpengaruh untuk menghalangi atau meniadakan pengakuan terhadap dinikmatinya atau dilaksanakannya hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh kaum perempuan (Margaret A. Schuler dan Dorothy Q. Thomas: 2001, 46). Dapat dikatakan bahwa Diskriminasi yang terjadi pada Perempuan disebabkan oleh adanya perbedaan gender (*Gender Difference*) atau peran sosial jenis kelamin di dalam masyarakat. Hal tersebut berlangsung melalui kontruksi sosial maupun kultural dan berlangsung cukup lama sehingga dianggap sebagai budaya dalam masyarakat tersebut.

Sejarah terjadinya diskriminasi terhadap Perempuan menurut Federick Angles (Mansour Fakih, 2002: 156) disebabkan oleh perubahan dalam organisasi kekayaan. Ditandai dengan munculnya era hewan peliharaan dan pertanian menetap, yakni suatu awal penciptaan *surplus*. Inilah dasar munculnya *privat property* yang kemudian menjadi dasar perdagangan, dan produksi untuk perdagangan. Pada saat itu laki-laki mengontrol produksi untuk perdagangan, maka mereka mulai mendominasi dalam kehidupan sosial politik. Kemudian peran Perempuan hanya menjadi *property* belaka, dan sejak itulah dominasi laki-laki dimulai.

Selanjutnya Ivan Illich (2001: 124) dalam bukunya Matinya Gender memberikan kisah nyata tentang pendapat Angles, disebuah desa bernama Lutheran yang terletak di kota Wurttenberg diantara tahun 1800 dan 1850 dimana saat itu jalan kereta api mulai dibangun melintasi daerah tersebut. Pertambahan jumlah penduduk di daerah tersebut akhirnya memaksa kebanyakan keluarga masuk ke dalam proses produksi dari hasil pertanian. Perempuan pun akhirnya masuk dalam proses ini dan mengakibatkan *Double Burden* (beban ganda) bagi Perempuan tersebut. Pada akhirnya laki-laki hanya memerintah ditempat kerja. Dan mulailah Perempuan tersubordinasi oleh laki-laki.

Muammar Qadthafi (2000:144) mengatakan bahwa baik pria ataupun perempuan adalah manusia. Dengan demikian keduanya memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan. Oleh karena itu diskriminasi diantara keduanya merupakan tindakan yang tidak ada pembenarannya. Diskriminasi terhadap perempuan menurut pandangan kaum feminis khususnya feminis beraliran Marxis banyak disebabkan oleh budaya atau kultur dalam masyarakat (budaya Patriarki).

Saat ini, budaya patriarki dimasyarakat manapun merupakan budaya yang banyak dianut. Partriarki dapat diartikan sebagai suatu struktur masyarakat di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipandang sebagai struktur yang memperlemah perempuan, yang terlihat dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan adanya pandangan Sakuntala dalam kitab Mahabarata, *"....Seorang isteri sejati yang seluruh jiwanya diabdikan kepada suaminya.... dan apabila suaminya pergi mendahului, istri yang bujaksana akan segera menyusulnya kedunia sana"*(Nyoman S. Pendit: 1980, 7). Atau pandangan Tultidas, dalam Kitab Ramayana. *"Ketika perempuan mandiri, itu akan membawa kutukan.gong, pemuda desa yang tolol, kaum sudra, perempuan.semua di antara mereka seharusnyalah dipukul"*.

Mansour Fakih (2002, 173) menjelaskan bahwa, Diskriminasi atau ketidakadilan terhadap perempuan menimbulkan akibat pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik diwilayah publik maupun domestik. Hal ini dikarenakan adanya *stereotype* gender yang dilabelkan pada kaum perempuan. *Stereotype* inilah yang mendorong tindakan kekerasan terhadap perempuan karena anggapan bahwa perempuan itu lemah dan laki-laki itu kuat. Padahal Soekarno (1951, 29) dalam bukunya Sarinah telah membantah mitos-mitos yang dilekatkan pada perempuan. Mitos tersebut antara lain bahwa laki-laki lebih pintar dari perempuan karena otak laki-laki lebih besar dari perempuan padahal besar otak tidak menentukan kecerdasan seseorang.

Kekerasan terhadap Perempuan

Terjadinya Kekerasan terhadap perempuan, apabila didasarkan pada teorinya Karl Marx, menyebutkan bahwa perempuan secara alami telah dikaruniai kemampuan *verbal* (berbicara) yang tinggi dan hal ini menyebabkan perempuan tersebut cerewet. Sedangkan laki-laki memiliki agresivitas yang tinggi. Sehingga apabila terjadi konflik diantara keduanya, laki-laki dalam menyelesaikan masalah tersebut cenderung menggunakan agresivitasnya yaitu dengan kekerasan yang bersifat fisik dan tindakan tersebut dapat berupa pemukulan ataupun penyerangan secara fisik.

Tidaklah dipungkiri bahwa terjadinya kekerasan terhadap perempuan amatlah dekat dengan *seks* (persetubuhan, persenggamaan). Persenggamaan tersebut dapat mengakibatkan kekerasan apabila terjadi penolakan dari salah satu pihak (biasanya perempuan). Hal ini

merupakan wajah destruktif dari seks itu sendiri, libido yang telah memuncak dan harus tersalurkan dapat memicu timbulnya pemerkosaan ataupun pemaksaan hubungan *seks*, bila tak tersalurkan.

Menurut pendapat Randy Thornhill dan Craig Palmer dalam bukunya yang berjudul *Natural History Of Rape*, berpendapat bahwa pemerkosaan termaksud dalam program biologis, yang tinggal dalam setiap laki-laki, semacam hasrat naluriah, yang memaksakan Gen-nya untuk ditanamkan pada generasi berikutnya, kalau perlu dengan kekerasan (Sindhunata dalam majalah Basis, 2003: 27). Pendapat kontroversial dari Thornhill dan Palmer tersebut menghalalkan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam melakukan usaha untuk menurunkan anak atau reproduksi apabila ditolak oleh perempuan yang diajaknya senggama.

Membicarakan mengenai kekerasan terhadap perempuan tidak boleh melupakan faktor-faktor yang mendukung terjadinya kekerasan tersebut. Oleh karena itu patut dijabarkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasaan terhadap perempuan:

A. Faktor Kebudayaan

Kata "Kebudayaan" berasal dari (bahasa Sangsekerta) *Buddhayah* yang merupakan bentuk jamak kata "*Buddi*" yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai "hal-hal ang bersangkutan dengan budi atau akal" (Soerjono Soekanto,2002: 172).

Berkaitan dengan definisi di atas maka kebudayaan merupakan hasil dari pemikiran manusia yang didasarkan kepada akal dan budinya. Oleh karena itu kebudayaan dapat dianggap sebagai sesuatu yang luhur karena berasal akal dan budi seorang manusia.

Seorang antropolog, E.B Tylor (Soerjono Soekanto, 2002 : 172) pernah mencoba mendefinisikan mengenai kebudayaan sebagai berikut:

"kebudayaan adalah kompleks yang yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang dapat diciptakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat".

Dengan kata lain kebudayaan tersebut dapat dipelajari oleh manusia. Sehingga kebudayaan merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai ataupun norma-norma serta pola-pola perilaku. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (Soerjono Soekanto, 2002: 173) merumuskan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sehingga kebudayaan dapat menghasilkan hal-hal yang bersifat materil (*material cuture*) dan rohaniah (*spiritual* atau *immaterial culture*). Hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2000: 9) yaitu keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu.

Layaknya sebuah sistem, kebudayaan disusun berdasarkan unit-unit

terkecil disebut unsur (*trait*). Menurut definisi Hoebel (dalam Paul B. Horton dan Chester L. Hunt: 1991, 72) unsur adalah suatu kesatuan corak perilaku yamg dipelajari dan dianggap tak dapat diperkecil lagi, atau produk nyata yang dihasilkan oleh perilaku tersebut. Oleh karena itu untuk dapat memahami lebih dalam mengenai kebudayaan maka harus mengerti mengenai aspek-aspek atau unsur-unsur kebudayaan. Menurut pendapat Harsojo (1977, 233), aspek-aspek kebudayaan terbagi lima (5), yaitu:

1. Teknologi dan kebudayaan materiil

Yang dimaksud dengan teknologi adalah jumlah keseluruhan dari teknik-teknik yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu masyarakat, yaitu keseluruhan dari pada cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan-bahan mentah dari lingkungannya, mengadakan *processing* dari pada bahan-bahan itu untuk dibuat menjadi alat kerja, alat-alat untuk menyimpan, dan makanan, pakaian, perumahan, alat-alat tranport dan kebutuhan lain yang berupa benda materiil (Harsojo: 1977, 233).

Hasil karya masyarakat menghasilkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan dalamnya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit tujuh unsur, yaitu (Seorjono Soekanto : 2002, 176):

a. Alat-alat produktif
b. Senjata
c. Wadah
d. Makanan dan minuman
e. Pakaian dan perhiasan
f. Tempat berlindung dan perumahan
g. Alat-alat transpor

Dengan teknologi tersebut masyarakat dapat memanfaatkan alam atau lingkungan yang ditempatinya dan memungkinkannya untuk menguasai alam.

2. Mata pencaharian dan sistem-sistem ekonomi

Studi mengenai mata pencaharian erat hubungannya dengan tingkat-tingkat masyarakat dalam perkembangannya sebelum mencapai tingkat teknologi mesin. Mata pencaharian hidup yang terdapat pada masyarakat yang bersahaja itu dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Mata pencaharian hidup yang intinya bersifat mengumpulkan bahan-bahan makanan yang sudah disediakan oleh alam.
b. Mata pencaharian hidup yang intinya adalah menghasilkan produksi artinya masyarakat mengolah alam sebagaimana adanya dan menghasilkan kebutuhan untuk hidup (Harsojo: 1977, 233).

Mata pencaharian masyarakat tersebut terus berkembang sampai pada tingkat dapat memproduksi kebutuhan hidupnya dan tidak usah berpindah-pindah lagi (*nomaden*). Mata pencaharian dalam perkembangannya menimbulkan masalah-masalah yang disebabkan oleh pembentukan sistem ekonomi (Harsojo: 1977, 233). Masalah-masalah tersebut antara lain berhubungan dengan perubahan di bidang tanah, harta pusaka, sistem kekerabatan, danlain-lain.

Menurut Karl Mannheim (1987, 111) dalam masyarakat *patriarchat*, terutama dalam tingkat perkembangan yang terakhir, pada umumnya kemuliaan pekerjaan ditekankan kepada pekerjaan se-

bagai pemburu dan prajurit. Pekerjaan dibidang pertanian dilakukan oleh budak dan kaum perempuan. Pekerjaan ini dipandang rendah walaupun pekerjaan ini sangat memberikan manfaat yang besar bagi komunitasnya.

3. Organisasi sosial

Kodrat alamiah manusia sebagai makluk *sosial-psychis* itu menyebabkan timbulnya organisasi-organisasi yang menjadi wadah masyarakat atau individu untuk mengaktualisasikan dirinya. Timbulnya organisasi sosial dan relasi antar manusia, terdiri atas dua landasan (Harsojo: 1977, 241), yaitu :

a. Organisasi *symbiotik* yang terdiri semata-mata atas tingkah laku fisik yang bersifat otomatis.
b. Organisasi sosial yang berdiri atas komunikasi dengan mengunakan lambang.

Organisasi sosial mempunyai aspek fungsi dan aspek sturktur (Harsojo: 1977, 242). Dalam aspek fungsionalnya organisasi sosial itu memperlihatkan manifestasinya dalam aktivitas kolektif dari manusia untuk mencapai tujuan, yaitu dari memelihara, mendidik dampai kepada melakukan peperangan misalnya. Sedangkan organisasi sosial apabila dilihat dari sudut implikasi strukturnya meliputi struktur dari kelompok sosial, pola umum baru kebudayaan manusia pada setiap waktu dan tempat dan seluruh *frame work* dari pada pranata sosial.

4. Kesenian

Berbicara mengenai kesenian tak akan lepas dengan seni. Menurut Plato (dalam Bagoes P. Wiryomartono: 2001, 18) seni sebagai *Memesis* dari daya-daya yang ada di luar kendali kesadaran manusia. Konsep *Memesis* sendiri menurut Plato (dalam Bagoes P. Wiryomartono: 2001, 8) adalah membawa kebajikan dan keluhuran ke tempat yang terang dalam arti *Aleithea* dengan mengenali prinsip-prinsip keteraturan kosmik secara makro hingga mikro. Sedang seni menurut Derrida (dalam Bagoes P. Wiryomartono: 2001, 97) adalah sebagai pertanyaan tentang kararteristik kehadiran yang dihadiri (representasi).

Dalam menaggapi hakekekat kesenian, Franz Boas (dalam Harsojo: 1977, 258) dalam studi klasiknya "*Primitive art*" (1927) memberikan *postulat* bahwa menjadi kodrat manusia untuk menjadi kodrat manusia untuk menyatakan daya kreasinya. Lebih lanjut Franz Boas menjelaskan bahwa seni itu bersumber kepada dua hal yaitu: pertama, peningkatan teknik dan kedua, ekspresi emosi dan pikiran.

Kesenian dapat dikatakan sebagai hal yang terpenting dari kebudayaan. Kesenian di dalamnya terdapat intergrasi antar individu dalam masyarakat, dan kreativitas sosial, kultural maupun individual. Nilai-nilai kesenian harus disesuaikan dan harus serasi dengan dengan haluan dan dasar politik di negeri dimana kesenian tersebut berada.

5. Sistem Kepercayaan atau Religi

Menurut Durkheim religi adalah "kesatuan sistem kepercayaan dan tindakan yang berhubungan dengan barang-barang yang suci". Johnstone (dalam Paul B. Horton dan Chester L. Hunt : 1991, 304) mendefinisikan agama sebagai sebuah sistem keyakinan dan praktek sebagai sarana bagi sekelompok orang untuk menafsirkan dan menanggapi apa yang mereka rasakan sebagai pengada adikodrati (*supranatural*) dan kudus.

Religi secara umum dapat di jabarkan dalam beberapa kategori, antara lain:

a. Percaya akan adanya dogma. Yaitu *facet ideasionil* seperti yang diekspresikan di dalam mitos dan teologi misalnya.
b. Organisasi kelompok. Dimensi personil, *facet* yang lebih lanjut dari pada organisasi sosial dalam arti yang luas, yang meliputi soal-soal tentang keanggotaan, kepemimpinan dan partisipasi individual.
c. Rituil. Yaitu pola-pola daripada tindakan-tindakan, yang biasanya sangat simbolis seperti bentuk-bentuk tertentu daripada pemujaan, pengorbanan dan larangan-larangan.
d. Obyek-obyek religius atau *paraphernalia*. Yaitu dimensi kebudayaan materiil, seperti rumah-rumah ibadah, altar, pakaian dan lambang-lambang, dalam kitab-kitab nyanyian agama dan ucapan-ucapan magi.
e. Unsur emosi. Hal ini yang erat hubungannya dengan pengalaman religius, dapat disebut seperti cinta, takut, keharuan. Sistem kepercayaan dari sesuatu kelompok manusia itu berdiri atas sebuah landasan yang menjelaskan cerita-cerita yang suci yang berhubungan dengan masa yang lalu, yang disebut mitos.(Harsojo: 1977, 253)

Kebudayaan yang dianut oleh masyarakat adalah kebudayaan yang sangat berorientasi pada laki-laki (*man oriented* atau *patriarchi*). Sehingga secara tak langsung aspek-aspek atau unsur-unsur kebudayaan yang ada ditafsirkan berdasarkan tafsir atau pandangan laki-laki. Dengan tafsir yang sangat membela laki-laki tersebut mengakibatkan seorang perempuan harus tunduk kepada laki-laki sebagai bentuk penghormatan sehingga menjadi dasar legalisasi tindakan kekerasan seseorang terhadap perempuan. Secara sosial budaya kekerasan terhadap perempuan terjadi dikarenakan oleh 3 (tiga) yaitu: Pertama, budaya patriarkhi yang mendudukkan laki-laki sebagai mahkluk superior dan perempuan sebagai mahkluk inferior. Kedua, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Ketiga, peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Contoh kasus namanya N (21), Dia pada waktu masih kelas satu SMP dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh kakaknya. Karena takut kepada orangtuanya maka dia tidak melaporkan kejadian tersebut. Dan hal ini berlangsung sampai N memiliki pacar. Pada saat akan menikah N menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, oleh orang tuanya N disuruh mengubur masa lalunya dan melakukan operasi selaput dara.

B. Kontrol Sosial (*social control*) Masyarakat Rendah

Pada setiap kehidupan bermasyarakat tentu menginginkan sebuah kehidupan yang harmonis, tertib dan aman. Oleh karena itu biasanya masyarakat cendrung berusaha menjaga *Status Quo* agar ketentraman, keamanan dan keharmonisan dalam masyarakat tetap terjaga. Sehingga sering hal-hal yang bertentangan dengan norma ataupun nilai yang berlaku dimasyarakat biasa ditabukan.

Dalam keadaan yang demikian, norma-norma, nilai-nilai, dan peraturan-peraturan ditaati oleh anggota masyarakat perlu adanya pengawasan atau *social control*. Pengawasan ini menurut Mayor Polak, YBAF (dalam Abdulsyani, 1987: 88) berfungsi sebagai penekan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran-pelangaran terhadap norma-norma, nilai-nilai, dan peraturan yang ada dimasyarakat sehingga disiplin dalam kelompok cenderung dapat dipertahankan. Lebih lanjut lagi Astrid S. Susanto (dalam Abdulsyani, 1987: 89) mengatakan bahwa pengawasan (*social contro*l) terjadi dikarenakan setiap kelompok akan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan ikatan kelompok, hal mana dilakukanya melalui penaatan terhadap norma-norma yang berlaku ataupun tujuan terhadap tertentu.

Masyarakat yang menganut budaya patriarki maka pengawasan (*social control*) yang dilakukan untuk melanggengkan norma-norma serta nilai-nilai patriarki tersebut. Sehingga kekerasan terhadap perempuan yang kurang mendapat perhatian dikarenakan akan menganggu atau mengugat kebudayaan patriaki tersebut. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa kontrol sosial begitu rendah apabila terdapat kekerasan terhadap perempuan lingkungannya.

Selain itu terjadi pergeseran perilaku masyarakat dari kolektivitas menjadi masyarakat yang individualistik menjadikan kepekaan sosial masyarakat terhadap penderitaan orang lain sangat kurang. Dan masih banyaknya masyarakat yang menggangap bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga adalah sebuah hal yang biasa dan dapat dimaklumi. Sebagai contohnya kasus di kabupaten Purworejo tahun 1995, seorang kepala desa memperkosa 2 orang warganya kasus ini sudah dilaporkan kepada Bupati Purworejo tapi kepala desa ini tidak mendapatkan tindakan apa-apa, kecuali peringatan dari camat agar tidak mengulangi perbuatannya (A. Made Tony Supriatna, 1996: 235).

C. Ketimpangan Gender (*gender disequality*)

Marginalisasi perempuan yang terjadi di masyarakat mengakibatkan perempuan hanya dianggap sebagai *the second sex*, atau warga kelas dua yang keberadaannya kurang diperhatikan. Menurut Simone De Beauvoir dalam bukunya *The Second* Sex, mengatatakan bahwa anggapan ini berakibat pada diperlakukannya perempuan sebagai objek dan laki-laki sebagi subjek, dan dengan demikian laki-laki membebaskan diri dari tanggungjawab terhadap kehidupan mereka sendiri (dalam Jostein Gaarder, 2003; 497).

Pandangan Simone De Beauvoir ini menunjukan adanya konsep *nature* dan *culture*, yang menurut Carol P. MacCormack telah gunakan untuk menunjukan adanya pemisahan atau stratifikasi diantara dua jenis kelamin (Irawan Abdullah, 1997: 3). Sifat *nature* atau alam yang diwakili oleh perempuan harus ditundukkan agar mereka lebih berbu-

daya (*culture*). Usaha membudayakan perempuan tersebut telah menyebabkan terjadinya proses produksi dan reproduksi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Implikasi konsep tersebut telah menjadi akar dari pemisahan peran di berbagai sektor kehidupan (Irawan Abdullah, 1997: 4). Lebih lanjut lagi Mansour Fakih (2002: 171) menjelaskan bahwa perbedaan gender (*gender different*) mengakibatkan terjadinya marginalisasi, subordinasi, adanya *stereotif*, dan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan menurut Ben Agger (2003: 200) supremasi laki-laki, muncul dari pembagian kerja yang berdasarkan *seks* (jenis kelamin), yang ada di wilayah publik maupun privat. Sehingga hal ini menyebabkan perempuan terpinggirkan secara ekonomi maupun politik.

Montagu (Sarlito Wirawan Sarwono: 171) mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan biologilah (bakat) yang menyebabkan timbulnya perbedaan peran jenis kelamin. Konsekwensi sosial dari perbedaan peran antar jenis kelamin misalnya laki-laki lebih memiliki dorongan yang besar untuk bekerja dan berprestasi. Hal itu berdampak pada pemisahan di sektor kehidupan, laki-laki bekerja maka di sektor publik dan perempuan berperan di sektor domestik. Ketimpangan hubungan antara laki-laki dengan perempuan di dalam stuktur sosial masyarakat menyebabkan terjadinya ekploitasi perempuan di dalam kehidupannya. Lebih jauh lagi mengakibabkan adanya ketergantungan (*dependendensi*) perempuan terhadap laki-laki karena sumber daya (seperti ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya) yang ada dikuasi dan dikelola oleh laki-laki.

Sebagai contoh sebuah kasus di Jawa Tengah seorang perempuan yang terus berusaha bertahan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya dikarenakan ketergantungan secara ekonomi yaitu ketidakmampuan membiayai kehidupan anak-anaknya tanpa dukungan suaminya. Padahal perempuan tersebut adalah lulusan dari perguruan tinggi dan pernah sekolah di luar negeri.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berbeda di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan. Menurut studi tersebut, terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan (www.sekitarkita.com), antara lain:

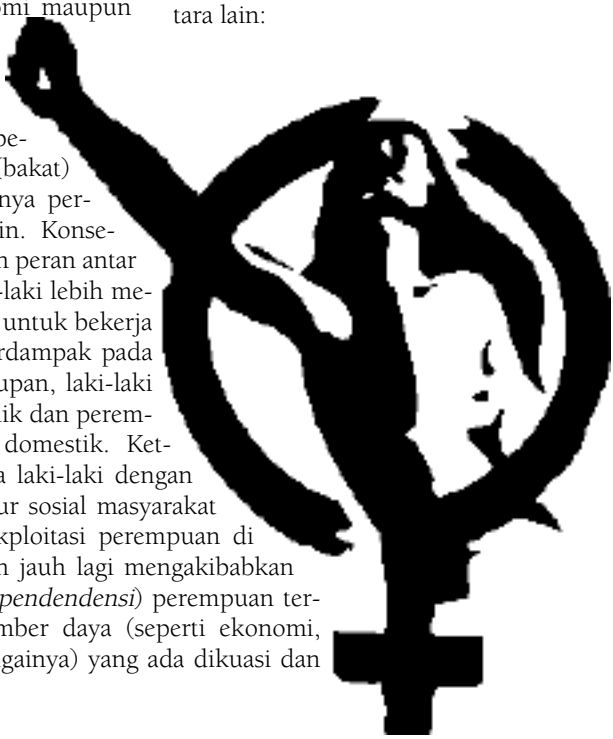

1. Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki;
2. Penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu konflik;
3. Otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan;
4. Hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan *setting* keluarga

Faktor-faktor tersebut seringkali terbungkus oleh mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya karena itu merupakan bagian dari 'kejantanan' laki-laki. Dengan melakukan tindak kekerasan, maka hal itu dinggap bisa mengurangi *stress* dan menunjukan siapa yang yang berkuasa. Namun dapat dikatakan bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi tersubordinasi.

Sri Suhandjati Sukri (2003: 12) dalam penelitiannya menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan khususnya istri. Berdasarkan penelitian tersebut faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan tersebut antara lain:

1. Usia,
   Bahwa semakin tua usia semakin rentan terhadap kekerasan. Dari penelitian mayoritas pelaku tindak kekerasan terhadap istri berusia antara 31 sampai 40 tahun.
2. Pekerjaan atau tingkat sosial ekonominya,
   Kondisi ekonomi yang belum mapan mempengaruhi kekerasan terhadap istri.
3. Pendidikan,
   Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit pelaku yang melakukan kekerasan terhadap istri. Hal ini mungkin disebabkan oleh kedewasaan berpikir sehingga setiap masalah tidak harus diselesaikan dengan kekerasaan.
4. Budi pekerti,
   Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kebiasaan suami yang memiliki kebiasaan buruk sebanyak 64% dengan rincian suka judi 12%, selingkuh 28%, suka mengucapkan kata-kata kotor 12%, 4% suka mabuk dan 8% mempunyai keburukan ganda maksudnya disamping suka judi juga suka mabuk atau sebaliknya.

Di samping asumsi-asumsi tertentu yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran-penafsiran terhadap pemahaman agama. ***

Gender Dari Beberapa Sumber

1). Dalam Kamus Bahasa Indonesia[a], gender (*gendér*, kata benda) berarti gamelan Jawa yang terbuat dari bilah-bilah logam yang dibagian bawahnya dipasang buluh bambu sebagai penggema.

2). Gender (*jénder*), dalam Ensiklopedia Feminisme disebut sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki atau perempuan. Margaret Mead dalam *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (1935) menempatkan pandangan bahwa jenis kelamin adalah biologis dan perilaku gender adalah konstruksi sosial.[b]

3). Gender memang berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan ciri biologis manusia yang diperoleh sejak lahir sehingga secara biologis dibagi menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan ciri fisik yang berbeda. Ciri biologis ini akan melekat selamanya dan tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan gender merupakan ciri yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural dengan mengaitkannya pada ciri biologis masing-masing jenis kelamin.[c]

4). Feminisme berasal dari kata latin *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminisme diartikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Timbul upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut. Operasionalisasi upaya pembebasan diri kaum perempuan dari berbagai ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan disebut gerakan feminisme.[d]

5). Permasalahan gender ini erat dengan kenyataan yang dapat ditemui sehari-hari terkait dengan pembagian peran/kerja berdasar perbedaan sex/jenis kelamin. Dari pendekatan psikologis, ada dua teori besar yang sering menjadi pijakan dalam memandang permasalahan tersebut, yaitu teori *nature* dan *nurture*.

6). Pengikut teori *nature* (teori 'alam') beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor-faktor biologis. Pengikut teori *nurture* (teori 'kebudayaan') beranggapan bahwa perbedaan ini tercipta melalui proses belajar dari lingkungan.[e]

7). Pada manusia purba, pembagian kerja laki-laki dan perempuan ini sebenarnya berawal dari berharganya perempuan – bukan karena lemah atau kuat. Ketika komunitas masih sedikit, untuk pergi berburu yang

penuh bahaya, maka para perempuan dengan kemampuan melahirkan anak (sehingga sangat berharga bagi kelangsungan kelompok) tidak diikutkan. Jika laki-laki yang tewas saat berburu maka hal itu tidak terlalu merisaukan.

8). Permasalahannya adalah, kenapa setelah berjalan ratusan-ribuan tahun, meskipun alasan berharganya perempuan (terkait dengan fungsi melahirkan untuk kelangsungan kelompok) tidak lagi relevan lagi, pembagian kerja berdasar sex tetap berlangsung?

9). Menurut Peter L Berger, realitas sosial paling tidak melibatkan tiga peristiwa, yaitu *eksternalisasi, obyektivikasi* dan *internalisasi*. Proses ide, gagasan keluar dari manusia merupakan eksternalisasi. Ketika ide, gagasan sudah ter-eksternalisir maka akan terjadi proses obyektivikasi yang sudah tidak tergantung lagi oleh yang mempunyai ide/gagasan. Ide atau gagasan yang otonom itu pada gilirannya akan di-internalisir oleh manusia lagi.

10). Berawal dari upaya mempertahankan keberlangsungan kelompok dengan melindungi 'aset' yang paling berharga, yaitu perempuan, perlahan pembagian peran / kerja berdasar sex ter-obyektivisir dan dari generasi ke generasi, melalui internalisasi terus-menerus maka terjadi pembiasaan (*habitualisasi*) yang mengarah pada suatu pelembagaan (*institusionalisasi*).

11). Ketika manusia menetap dengan ditemukannya pertanian, pembagian kerja seperti itu tetap dipertahankan karena pada awalnya bertani juga merupakan kegiatan yang berbahaya, baik terhadap ancaman binatang buas maupun persinggungan dengan lahan pertanian kelompok/ anggota kelompok lain.

12). Dengan berkembangnya pertanian dan menetapnya manusia maka proses akumulasi mendapatkan kemungkinannya. Manusia bisa menyimpan hasil kerjanya tanpa repot karena terus berpindah-pindah. Karena proses pengumpulan berlangsung dengan peran laki-laki yang lebih menonjol, maka akumulasi yang berakibat berkembangnya hak milik ini semakin menguatkan posisi laki-laki terhadap perempuan.

13). Maka, secara tidak langsung terjadilah 'pengaturan kekayaan' dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan 'pengaturan kekayaan' ini cenderung bersifat konservatif, artinya cenderung mempertahankan diri. Pengaturan kekayaan berdasarkan hak milik ini akan mempengaruhi bangunan atas, dalam hal ini ide-ide, gagasan-gagasan, mitos-mitos, takhayul-takhayul, apa yang dianggap baik dan buruk dan bagaimana masyarakat harus diatur.

Dan bangunan atas ini akan mempengaruhi masyarakat, juga dengan proses-proses internalisasi.

14). Bangunan atas akan merefleksikan kepentingan pengaturan kekayaan, dan karena kecenderungan konservatif dari pengaturan kekayaan ini maka ketika terjadi proses internalisasi dari bangunan atas oleh masyarakat pada dasarnya kepentingan yang diuntungkan dalam pengaturan kekayaan-lah yang diinternalisir, dalam hal ini adalah kaum laki-laki.

15). Jika dilihat lebih jauh maka pengaturan kekayaan ini merupakan hasil dari hubungan-hubungan produksi. Hubungan produksi sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan produksi. Dan dari beberapa hal di atas, nampak sekali proses panjang yang meletakkan kekuatan-kekuatan produksi di tangan kaum laki-laki merupakan faktor yang penting.

16). Dapat dilihat bahwa permasalahan pembagian kerja berdasar sex ini terlembaga melalui dua proses, yaitu proses internalisasi dan proses-proses yang terkait dengan hubungan produksi (kekuatan produksi).

17). Suatu upaya yang memutlakkan satu sisi saja akan berujung pada kegagalan. Contoh yang dilakukan oleh Lenin setelah revolusi 1917. Lenin, setelah dia berkuasa, berusaha menghapuskan segala macam kondisi sosial ekonomi yang membuat wanita tergantung kepada laki-laki, misalnya dengan membuat dapur-dapur umum supaya wanita tidak terikat di dapur untuk memasakkan makanan bagi keluarganya, mendirikan tempat penitipan anak-anak, mempermudah proses perceraian, menganjurkan wanita bekerja di luar rumah tangga, dan sebagainya. Tapi ideologi yang menghendaki wanita bekerja di dalam rumah tangga masih tetap kuat, karena itu usaha Lenin ini tidak begitu sukses. Bahkan usaha ini menimbulkan persoalan-persoalan baru yang mengganggu perkembangan masyarakat Rusia. Maka akhirnya, Stalin mengembalikan wanita pada posisinya yang semula, yakni ke dalam rumah tangga.[f]

18). Ada tiga golongan dalam gerakan feminis di Amerika, yaitu kaum *feminis liberal*, kaum *feminis radikal* dan kaum *feminis sosialis*.

19). Kaum feminis liberal (juga dikenal dengan nama kaum *feminis hak-hak perempuan*) mendasari gerakannya pada prinsip-prinsip falsafah liberalisme, yakni bahwa semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus punya kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Kaum feminis liberal percaya beranggapan bahwa sistem patriarkal dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum wanita dalam hubungannya dengan laki-laki. Wanita harus sadar akan hak-hak ini, wanita harus menuntut hak-hak ini.

20). Bagi kaum feminis liberal, ada dua cara untuk mencapai tujuan ini. *Pertama* adalah melakukan pendekatan psikologis dengan cara membangkitkan kesadaran individu. Cara *kedua* adalah dengan menuntut pembaruan-pembaruan hukum yang tidak menguntungkan wanita, dan mengubah hukum ini menjadi peraturan-

peraturan baru yang memperlakukan wanita secara sama rata dengan laki-laki.

21). Gerakan feminis liberal tidak secara langsung membicarakan dasar-dasar teoritis dari gerakannya. Gerakan ini tidak mempunyai teori yang jelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan dan mempertahankan pembagian kerja secara seksual. Mereka hanya melihat wanita diperlakukan tidak adil dan mereka ingin mengubahnya. Titik. Tidak adanya teori ini mungkin merupakan kelemahan dari gerakan ini, tapi juga mungkin merupakan kekuatannya. Gerakan ini, karena tidak didasarkan pada teori-teori yang abstrak, lebih mudah menarik kaum wanita. Program-program mereka sederhana dan nyata, mudah dipahami dan mempunyai sasaran yang jelas.

22). Gerakan feminis liberal juga merupakan gerakan kaum perempuan yang tertua. Tapi sukses yang mereka capai sampai sekarang sangat terbatas. Kesadaran wanita tentang perlakuan yang tidak adil terhadap diri mereka memang bertambah, tapi tidak banyak yang berubah dalam masyarakat dalam hal memperbaiki kepincangan ini. Kaum feminis liberal kurang atau tidak memperhatikan faktor-faktor sosial ekonomi yang mendukung pembagian kerja secara seksual ini. Gerakan ini hanya menuntut "perbolehkan kami masuk", yakni memasuki daerah di mana laki-laki hidup secara lebih enak.

23). Gerakan feminis radikal mendasarkan perjuangannya pada karya-karya yang ditulis oleh Kate Millet (1970) dan Shulamith Firestone (1972). Gerakan ini beranggapan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab pembagian kerja secara seksual adalah sistem patriarkal.

24). Kate Millet menyatakan bahwa hubungan laki-laki dan wanita di dalam masyarakat merupakan hubungan politik. Dia mendefinisikan politik sebagai "hubungan yang didasarkan pada struktur kekuasaan, suatu sistem masyarakat di mana satu kelompok manusia dikendalikan oleh kelompok manusia lain". Nama struktur kekuasaan di mana laki-laki mengendalikan wanita adalah patriarki. Lembaga utama dari sistem patriarki ialah keluarga. Millet melihat patriarki sebagai sistem kebudayaan, tapi dia terutama menekankan aspek psikologisnya. Patriarki merupakan simpang pertemuan antara psikologi (kebiasan rohani) dan kebudayaan (cara kehidupan).

25. Perjuangan kaum feminis radikal dalam melawan sistem patriarkal tidak bisa diingkari pentingnya. Tapi kelompok ini terlalu menekankan perjuangan melawan ideologi dan lembaga-lembaga yang mengembangkan ideologi ini. Gerakan ini terlalu memusatkan perhatiannya pada kenyataan bahwa laki-laki mendapat banyak keuntungan dari sistem patriarkal. Dengan perkataan lain, kaum feminis radikal terlalu melihat laki-laki sebagai musuh mereka yang utama.

26. Gerakan feminis sosialis mendasarkan perjuangannya pada teori Engels dan teori-teori Marxis pada umumnya. Berbeda dengan kaum feminis liberal, kaum feminis sosialis mem-

beri perhatian lebih besar pada kondisi sosial ekonomi.

27. Gerakan feminis sosialis percaya, berdasarkan teori *substruktur* (dasar-dasar materiel dari masyarakat, yakni sistem sosial ekonomi, dan siapa yang diuntungkan oleh sistem ini), dan *superstruktur* (organisasi masyarakat yang mendukung sistem pembagian hasil-hasil produksi yang pincang ini, misalnya sistem nilai-nilai masyarakat tersebut, sistem hukum yang ada, dsb), bahwa pembagian pekerjaan berdasarkan seksual hanyalah merupakan bagian dari superstruktur yang akan hancur dengan sendirinya bila substruktur berubah.
28. Kritik yang dilancarkan kepada kaum feminis sosialis adalah terlalu menekankan faktor-faktor sosial ekonomi dan gagal melihat faktor-faktor ideologi dan lembaga yang menyebarkan ideologi ini sebagai sama pentingnya dengan faktor-faktor sosial ekonomi. Dengan penemuan kembali teori-teori Gramsci pada kalangan pemikir-pemikir Marxis, faktor-faktor ideologi mendapatkan perhatian yang semakin bertambah.

Semarang, 22 Januari 2009

Pergerakan Kebangsaan Kota Semarang
(Pernah disampaikan dalam acara diskusi Koperasi Perempuan "Nuansa Mandiri")

(Catatan)

a Em Zuk Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Diva Publisher

b Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Fajar Pustaka Baru, Jogjakarta, 2002

c Achmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001

d Endang Sumiarni, *Jender & Feminisme*, Jalasutra, Jogjakarta, 2004

e Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Gramedia Jakarta, 1985

f Untuk no. 17-28, *Ibid, hal 36-44*

Ngobrol Bareng Kwik Kian Gie

Sekian lama ekonom dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini tak menampakkan batang hidungnya. Kali ini Kwik Kian Gie turun gunung. Kamis siang itu (27/9), Kwik diundang oleh Panitia Kerja Bantuan Likuiditas Bank Indonesia DPR (Panja BLBI). Kapasitasnya sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Keuangan era Presiden Gus Dur. Datang pula mantan Menko Ekonomi lainnya, Rizal Ramli.

Sebelum acara dimulai, saya berkesempatan ngobrol banyak dengan pria asal Juana, Pati -*well,* sedaerah dengan saya. Rupanya dia sudah mulai berbincang dengan Ruis si jurnalis Kontan dan Pedro sang pewarta Rakyat Merdeka. Saya pun turut nimbrung. Tutur katanya halus dan runtut. Beda nian dengan orasi berapi-apinya di muka Panja BLBI. Apalagi ketika berkonfrontasi dengan para anggota dari Fraksi PDIP. Berikut petikan obrolan santai ini:

DPR saat ini menggalang interpelasi soal BLBI. Tanggapan Bapak?

Buat apa? Semuanya tidak jelas. Yang diinterpelasi apa, yang dimasalahkan apa? Kalau peristiwa itu merugikan negara, memang iya. Kalau itu urusan besar, itu iya. Tapi ketika masalah itu muncul pertama kali, berentet kebijakan yang diambil salah, sudah ada yang mengingatkan langkah itu salah. Tapi tidak digubris. Tidak dianggap dan jalan terus. Ketika sudah rusak total seperti ini, empat tahun kemudian, rame lagi. Mestinya DPR tanya, ada apa -meskipun telat mikir? Kalau saya secara teknis disuruh menjelaskan, urutannya seperti apa, saya bisa. Tapi saya kira anggota DPR sudah tahu sudah hafal.

Menurut saya, mungkin BLBI ini menarik bagi anggota dewan yang masih baru. Mereka kan terpilih pada 2004. Jadi buat mereka menarik secara akademis. Mungkin mereka tidak sadar. Sebab ini adalah kesalahan fatal di masa lampau. Tapi kesalahan itu sudah dilakukan. Ibaratnya nasi sudah jadi bubur, buburnya sudah habis dimakan. Eksistensinya sudah tidak ada.

Bisa juga DPR gerah melihat pemerintah lamban menangani kasus ini?

Kalau kenyataannya, memang riil. BLBI tidak ditanggapi secara cepat. Memang masih belum selesai. Jadi yang utang kepada negara dengan cara perbankan sebagian memang sudah selesai sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh pemerintah. Tapi empat pihak yang menghebohkan sowan ke Istana kan belum tuntas. Sampai sekarang kan tidak selesai. Bagaimana Menkeu menyelesaikan?

Kalau diungkit lagi mengancam kepastian investasi?

Yah, bisa. Oleh karena investor berpikir, kalau saya melakukan sesuatu yang sudah sejajar seperti saat ini, sama sekali sudah cocok dengan kebijakan pemerintah, nanti empat tahun kemudian diung-

kit lagi? Berpikirnya kan seperti itu.
Yang lebih penting di kemudian hari, jangan mengambil kebijakan yang menimbulkan krisis. Makanya sebaiknya DPR menelaah kebijakan tim ekonomi sekarang ini, membuka peluang krisis kembali atau tidak? Menurut saya iya. Karena tidak ada lagi pembatasan keluar-masuknya modal. Modal jangka pendek mudah masuk, kalau ditarik juga kacau lagi. Kalau begitu akan terulang krisis lagi.

Memangnya kebijakan sekarang seperti apa?
Liberal total. Semuanya dibuka. Kalau menurut pendapat saya, dari dulu saya terang-terangan, kalau tim ekonomi dipegang oleh mahzab tertentu, hasilnya yah begini ini. Mulai dari Pak Wijoyo Nitisastro, terus menurun ke generasi selanjutnya, Ali Wardana, Subroto, Moh Sadli, Emil Salim, JB Sumarlin, lalu sekarang nampak dalam personifikasi tiga orang: Boediono (Menko), Sri Mulyani (Menkeu), dan Marie Pangestu (Mendag).

Mahzab ini pernah berhenti sebentar saja, hanya satu tahun. Ketika saya menjadi Menko dan Bambang Sudibyo sebagai Menkeu. Tapi kelompok ini kan tidak tinggal diam. Mereka menggencet habis saya. Presiden Gus Dur disuruh segera pecat saya, cepetan mecat. Dan akhirnya tidak memecat, tapi lewat reshuffle. Sebelum kocok ulang saya sudah mengundurkan diri. Dalam reshuffle Pak Bambang Sudibyo kena kocok ulang karena beliau gak mau mengundurkan diri.
Setelah itu, Bu Megawati Sukarnoputri naik sebagai presiden, mahzab itu masuk lagi. Boediono (Menkeu), Rini Suwandi (Menperindag), Laksamana Sukardi (Meneg BUMN). Semua liberal. Pro Amerika. Sampai saat ini. Lobi Amerika sangat kuat menekan kita.

Ada manfaatnya bagi kita gak mahzab Berkeley ini?
Itu tergantung prasyarat yang kita persiapkan sendiri. Itu yang krusial. Kalau hanya asal buka, tidak transparan, masyarakat tidak boleh tahu, DPR tidak boleh tahu, yang tahu hanya sesama menteri, yah sangat bisa terjadi. Yang banyak data itu Pak Amin Rais. Dia sudah berteriak modal asing masuk hanya untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Lewat pertambangan, mereka mengeduk kekayaan alam dengan cara tidak transparan.
Lalu sektor lain juga boleh masuk dengan bebas. Telepon boleh, satelit boleh, semua jatuh ke tangan mereka. Tidak ada batasnya sama sekali, pembedaan barang mana yang penting bagi rakyat (Pasal 33 UUD 1945) sudah terbuka sama sekali. Sektor edukasi dan pelayanan kesehatan, teve juga boleh, bensin pun boleh, asing boleh masuk.

Kalau kondisi tidak berubah, ke depannya bakal seperti apa?
Elit pemodal asing bakal makin makmur, kekuatan adikuasa memang menghendaki kebijakan kita seperti ini. Hasilnya, jika kita kejar pendapatan nasional melulu (PDB), hanya mengakibatkan kemelaratan bangsa Indonesia, sebagian besar rakyat kita. Dan ini akan berlangsung hand in hand terus-terusan. Bisa sangat lama. Sama seperti Belanda menjajah. Orang Indonesia yang jadi kroni Belanda sangat makmur. Tapi rakyatnya hanya hidup dua setengah sen sehari. Itu bisa berlangsung ratusan tahun, kenapa sekarang tidak. Hanya sekarang praktis rakyatnya dijajah oleh elitnya sendiri, tanpa ada pemberontakan.

Pemimpin mana yang menurut Bapak bisa merombak wajah Indonesia?
Susah menunggu perubahan lewat proses demokrasi. Apa benar Pemilu 2009 membawa perbaikan? Oleh karena itu, cara konstitusional sudah tidak bisa diharapkan lagi. Komunitas madani, cuma bersuara dan tidak ada dampak konkret. Perbaikan hanya bisa diperoleh dari pemimpin manusia yang ***tegas***. Menurut saya ada. Saya rasa Pak ***Ryamizard Ryacudu***. Dia oleh Pak SBY dijanjikan betul-betul jadi panglima, tapi di tengah jalan SBY ingkar janji. Ryamizard adalah pemimpin yang tidak mau menonjol. Kalau tidak dibutuhkan yah tidak. Sepanjang yang saya kenal, iya. Dia ngerti persis neoliberalisme. Tapi tak banyak omong.
Satu-satunya yang berani Gus Dur. Bu Mega, anak kandung Bung Karno saja langsung takluk kok. Makanya nanti saya mau tanya pada anggota Fraksi PDIP, Anda mau apa? Presidenmu saja begitu kok. Itu kan presiden saya juga. Mau apa sok jadi oposisi? Toh juga menjadi antek Amerika. Hahaha.

Tapi tetap jadi partai wong cilik kan?
Apa iya? Kalau dilihat prospeknya kan tidak. Wong ciliknya sendiri merasa ditinggal. Kita lihat saja, kalau Bu Mega keliling apakah dia dipuja atau dihujat? Bisa saja hujatan itu ditutup-tutupi hanya dengan bertandang ke hotel-hotel.

Sekarang kegiatan Bapak apa?
Saya sih cuma ngurus Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) di Sunter. Kalau saya sih sehari-hari masih di tempat lama. Di Jalan Taman Tanah Abang. Itu kantor saya yang duluuu sekali. Yang pasti tidak ngajar neoliberalisme. Pasti tidak. Hahaha...

Nulis?

Masih. Tapi tak bisa kontinu. Jenuh loh. Tiap hari harus cari topik apa. Sekarang temanya apa sih?

Kawasan ekonomi khusus, peraturan pesangon?
Yah bisa saja sih.

Sejurus kemudian, pintu ruang tunggu tamu terbuka. Dari luar, masuklah legislator asal Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo. Dradjad dengan berat hati memotong perbincangan kami. Dia mengingatkan, rapat dengar pendapat bakal dimulai. Di dalam ruang sidang, Rizal Ramli telah menunggu.

September 28, 2007
Sumber: http://yacobyahya.wordpress.com/2007/09/28/ngobrol-bareng-kwik-kian-gie/

"SUATU BANGSA AKAN BESAR DAN KUAT BUKAN OLEH BANGSA LAIN DEMIKIAN PULA LEMAH & HANCURNYA JUGA BUKAN OLEH BANGSA LAIN TETAPI OLEH BANGSA ITU SENDIRI"

Ryamizard Ryacudu, *BANGKIT INDONESIAKU,*
(Disampaikan pada Konferensi Studi & Rakernas I Pergerakan Kebangsaan, Yogjakarta, Mei 2008)